

**KINERJA TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI)
POLISI RESORT (POLRES) DI KABUPATEN ENREKANG**

Disusun Dan Diajukan Oleh:

HENDRA

Nomor Stambuk: 10561 04901 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**KINERJA TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI)
POLISI RESORT (POLRES) DI KABUPATEN ENREKANG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh:

HENDRA

Nomor Stambuk: 10561 04901 14

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Kinerja Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polisi Resort (Polres) Di Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Hendra

Nomor Stambuk : 105610490114

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Hj. Sudarmi, M.Si

Pembimbing II



Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si

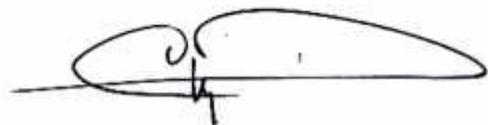
Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Nasrul Haq, S.Sos., M.PA

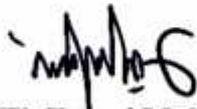
PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0839/FSP/A.1-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



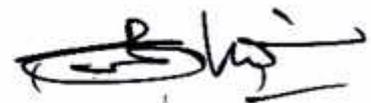
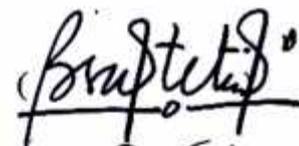
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji:

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si (Ketua)
2. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si
3. Dr. Muhammad Tahir, M.Si
4. Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawa ini

Nama Mahasiswa : Hendra

Nomor Stambuk : 10561 04901 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 12 Januari 2019

Yang Men yatakan

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke, positioned above the name Hendra.

Hendra

ABSTRAK

HENDRA. Kinerja Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polisi Resort (Polres) Kabupaten Enrekang (dibimbing oleh Sudarmi dan Adnan Ma'ruf).

Tujuan penulis penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja dari Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang dalam menangani kasus pungutan liar di Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana semua data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan informan dalam penelitian ini sebanyak sebelas orang yang terdiri dari ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang, kepala inspektorat Kabupaten Enrekang, anggota Polres dan masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas kinerja Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang yang terdiri dari produktifitas yang terdiri dari indikator ketepatan waktu serta loyalitas menunjukkan bahwa ketepatan waktu pelaksanaan tugas dari Tim Saber Pungli sudah baik serta sikap loyalitas dari Tim Saber Pungli yang menunjukkan ketaatan terhadap aturan, kualitas pelayanan yang indikatornya adalah kesesuaian tugas dan kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan tugas serta fungsinya namun kepuasan masyarakat atas pelayanan masih rendah, responsibilitas yang memiliki indikator kecepatan pelaksanaan tugas yang masih perlu dibenahi dengan melakukan patroli, dan akuntabilitas yang menunjukkan bahwa sangat tingginya sikap tanggung jawab atas pekerjaan.

Kata Kunci : kinerja, saber pungli, pungutan liar

KATA PENGANTAR

“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu”

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KInerja Tim Sapu Bersi Pungutan Liar (Saber Pungli) Polisi Resort (Polres) Kabupaten Enrekang”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuandan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: Ibunda Dr. Sudarmi, M.Si selaku pembimbing I dan Ayahanda Adnan Ma’ruf, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ibunda Dr. Ihyani Malik,S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., M.Pa selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ucapan terima kasih penulis hanturkan kepada Kedua orang tua Ayahanda Tammu dan Ibunda Sanira serta Kakanda Siti Hajar dan Adinda Sri Rahmayanti maupun segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan,

baik moral maupun materil. Dan juga ucapan terimah kasih kepada Bapak Aziz Taba sekaku ketua dari Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang beserta jajaranya yang telah memberikan informasi-informasi demi terselesainya penelitian ini. Erna seseorang yang selalu saya repotkan bersedia menemani tanpa mengenal kata lelah ke tempat lokasi penelitian walaupun jarak yang bisa dikatakan cukup jauh. Teman-teman terbaikkku Zohra, Emy, Rasna, Maemuna, Mutmainnah, Farid, Ibnu, dan Narty yang menjadi penyemangat yang selalu membantu untuk selalu semangat dalam mennyelesaikan penelitian, pemberi dorongan dan pengukir senyum disaat lelahku.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 12 Januari 2019



Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Skripsi	ii
Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Konsep Kinerja	8
B. Konsep Pungli	16
C. Saber Pungli	21
D. Kerangka Pikir	22
E. Fokus Penelitian	23
F. Deskripsi Fokus Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	25
B. Jenis dan Tipe Penelitian	25
C. Sumber Data	26
D. Informan Penelitian	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis Data	28
G. Pengabsahan Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31

B. Gambaran Umum Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang	34
C. Kinerja Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang	41
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	77

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar

- 1. Gambar 1.3 Kerangka Pikir22**
- 2. Gambar 2.3 Peta Wilayah Kabupaten Enrekang31**
- 3. Gambar 3.3 Struktur Organisasi Tim Saber Pungli39**

DAFTAR TABEL

1. **Tabel 1. 2 Informan Penelitian27**
2. **Tabel 2.2 Anggaran Pengendalian Dan Pengawasan Pungli40**

DAFTAR LAMPIRAN

1. Riwayat Hidup	78
2. Pedoman Wawancara	79
3. Dokumentasi	80
4. Matriks Wawancara	82
5. Matriks Perbaikan	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memberikan pelayanan publik merupakan suatu kewajiban yang telah diamatkan konstitusi kepada pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Terkait dengan kepentingan publik sangat erat kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya. Setiap masyarakat tentunya membutuhkan pelayanan publik sebagai contoh dimulai dari akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat ijin mengemudi, hingga akta kematian. Didalam menjalankan pelayanan tersebut pejabat administrasi memiliki kewenangan yang sering disebut dengan diskresi. Namun ternyata adanya diskresi rentan sekali dengan praktek pungutan liar (Pungli). Pelayanan yang berbelit-belit dan tidak efisien juga memicu adanya pungutan liar, hal ini dikarenakan pungutan liar telah menjadi budaya di Indonesia.

Pungutan liar atau kerap disebut dengan pungli merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain untuk memungut biaya dalam jumlah tertentu pada tempat yang seharusnya tidak dipungut biaya, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pungutan liar bisa dilakukan oleh siapa saja, tetapi kebanyakan hal tersebut dilakukan oleh para pejabat atau aparat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenangnya. Walaupun pungli termasuk dalam tindakan ilegal dan digolongkan sebagai KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), tetapi kenyataannya hal ini jamak di Indonesia. Jika dikaji lebih dalam makna pungli adalah aktivitas memungut biaya pada tempat yang seharusnya sama sekali tidak dipungut biaya, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar

yang mana pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Maka dapat dikatakan bahwa pungli merupakan tindakan pemerasan sedangkan dalam hukum pemerasan merupakan tindakan pidana.

Pungutan liar juga dibahas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengakomodir perbuatan pungutan liar, adapun penjelasan beberapa pasal dalam KUHP yang membahas tentang pungutan liar yaitu ada dalam Pasal 368 KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana paling lama sembilan bulan” dan Pasal 423 KUHP yang berbunyi “seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Kata pungutan liar sejak diperkenalkan oleh seorang pejabat Negara, tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 423 KUHP dan ternyata pungutan liar itu mempunyai akibat yang sifatnya sangat merugikan bagi penegak hukum di tanah air, karena masyarakat kemudian mempunyai kesan bahwa menurut hukum itu seolah-olah terdapat gradasi mengenai perbuatan-perbuatan memungut uang dari rakyat yang dilarang oleh undang-undang, yakni dari tindak yang seolah-olah harus

dituntut menurut hukum pidana yang berlaku hingga tingkat yang seolah-olah harus dituntut menurut hukum yang berlaku. Sedangkan saat ini pungutan liar memang jarang membuat pelakunya diajukan ke pengadilan untuk diadili, melainkan cukup dengan diambil tindakan-tindakan disipliner atau administratif terhadap mereka, padahal pungutan liar merupakan tindak pidana yang tergolong dalam kategori korupsi yang diatur dalam pasal 12 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perbuatan yang dilarang dalam pasal 423 KUHP adalah dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa orang lain melakukan suatu pembayaran seperti itu dilakukan berdasarkan suatu peraturan undang-undang.

Pungutan liar kebanyakan disebabkan oleh banyaknya pejabat daerah yang menyalahgunakan wewenang kekuasaannya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, pungutan liar juga banyak terjadi dalam lingkungan masyarakat yang didasari oleh ancaman dan paksaan pemungutan biaya pada tempat yang tidak seharusnya dipungut biaya, berkembangnya pungutan liar akibat dari kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam melakukan pelaporan suatu tindakan pungutan liar, bahkan adapula masyarakat yang turut serta dalam praktek pungutan liar guna untuk memberikan kelancaran dalam urusannya seperti halnya melakukan pembayaran atau menyogok aparat demi kelancaran urusannya.

Permasalahan atau efek buruk dari adanya pungutan liar atau pungli yang sangat merugikan Negara, maka Presiden Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan suatu kebijakan yang bertujuan untuk memberantas pungutan liar dengan membentuk suatu tim yang bertugas khusus untuk memberantas pungutan liar yang di sebut dengan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dalam sebuah rapat koordinasi dengan Gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara,

Kamis, 20 Oktober 2016. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli) merupakan salah satu bagian kebijakan pemerintah dalam melaksanakan reformasi dibidang hukum agar tercipta suatu pemerintahan yang bersih, jujur, dan adil dari kegiatan pungutan liar guna meningkatkan kemajuan bangsa dan negara khususnya dibidang hukum dan tatanan pemerintahan.

Kebijakan Presiden Jokowi dalam usaha meberantas kasus pungutan liar di Indonesia telah diterapkan juga oleh Pemerintah di Kabupaten Enrekang dengan membentuk Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang dimana juga bertugas untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kinerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian maupun lembaga pemerintah daerah. Pembentukan Tim Saber Pungli di Kabupaten Enrekang yang diketuai oleh Kampol Azis Taba diharapkan dapat memberantas praktek pungutan liar baik di pemerintahan maupun ruang lingkup masyarakat. Adapun usaha yang telah dilakukan oleh ketua Tim Saber Pungli di Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan kualitas para personilnya yaitu dengan melakukan suatu sosialisasi sekaligus rapat koordinasi yang diikuti oleh 30 anggota tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang, kegiatan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan pemahaman terkait penanganan pungutan liar di Kabupaten Enrekang demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan berkinerja dalam kaitannya dengan mereformasi birokrasi.

Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang sendiri telah menemukan tiga kasus pungutan liar sepanjang tahun 2017. Hal tersebut disampaikan langsung oleh ketua Tim Saber Pungli Enrekang (tribunenrekang.com), Kampol Azis Taba saat rapat koordinasi di kator Inspektorat Enrekang Jumat, 15 Desember 2017. Ketiga kasus

tersebut merupakan temuan langsung dilapangan, kasus pertama yaitu kasus Pasar Cakke yang melibatkan Kepala Pasar dan Satpamnya dengan barang bukti uang tak lebih dari Rp 1 Juta. Kasus itu hanya dilakukan pembinaan dan diajukan ke Bupati dan langsung dilakukan pemecatan terhadap pelaku. Kasus kedua dibagian KIR yang melibatkan satu orang dengana barang bukti uang Rp 300 ribu, kasus tersebut telah diajukan ke Bupati dan pelakunya telah dipidana atau demosi. Kasus ketiga yaitu kasus parkir liar yang terjadi di Pasar Sentral Enrekang, pelaku hanya dilakukan pembinaan terhadap kasus tersebut karena pelaku masih dibawa umur. Dari beberapa kasus yang tertera diatas maka dapat dikatakan bahwa kinerja tim saber pungli dalam memberantas pungutan liar di Kabupaten Enrekang belum mencapai tingkat efesiensi yang baik dimana hukuman atau tindakan yang diberikan pada para pelaku pungutan liar belum mampu untuk memberikan efek jera dikarenakan hanya dilakukan sebuah teguran yang tidak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam KUHP.

Muhammad (2013), berdasarkan hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa secara umum kinerja (aspek manajerial dan interpersonal) pejabat atau petugas operasional Polri relatif cukup tinggi. Disamping adanya kemajuan yang berarti, masih ditemukan hal-hal sebagai berikut: pertama Binkamtibmas masih belum menjangkau kehidupan semua lingkungan pemukiman, sementara peranan Binkamtibmas belum populer, tampilan patroli yang acuh termasuk pembiaraan atas tindakan pidana yang ditemukan, dan penanganan untuk rasa yang kurang terkontrol, kedua sikap diskriminasi, keberpihakan, suap, tidak tepat waktu, dan pengkoordinasian penanganan perkara untuk maksud tertentu (imbalan, uang), ketiga kredibilitas penyidik baik dalam persiapan pemeriksaan dan penyusunan (tata

bahasa) berita acara, maupun pertanggungjawaban teknis atas hasil penyidikan sampai tingkat penyidikan yang dinilai masih kurang.

Darwis (2015), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: pertama persepsi pegawai mengenai pemberian tunjangan kinerja termasuk sangat tinggi, kedua kinerja pegawai termasuk sangat tinggi, ketiga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemberian tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai. Dari kedua jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja seorang pejabat atau petugas akan mengalami kemajuan jika tunjangan yang diberikan memadai. Berdasarkan uraian di atas maka penulis begitu tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Kinerja Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polisi Resort (Polres) di Kabupaten Enrekang”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat yaitu “bagaimana kinerja Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polisi Resort (Polres) di Kabupaten Enrekang?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polisi Resort (Polres) di Kabupaten Enrekang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang keilmuan, khususnya dibidang Ilmu Administrasi Negara.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, bahan informasi, dan acuan bagi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara untuk kegiatan pengkajian dan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritikal dan kritikal bagi pemertintah Kabupaten Enrekang dalam hal kegiatan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Enrekang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan masyarakat luas terkait dengan pungutan liar di Kabupaten Enrekang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Kinerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang hendak dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja. Kinerja dipergunakan oleh pimpinan untuk melakukan penilaian secara periodik mengenai efektifitas operasional organisasi dan pegawai berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya melalui penilaian kinerja, organisasi dan pimpinan dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pegawai dalam menjalankan tugas yang diterima. Dengan kata lain bahwa kinerja berkaitan dengan hasil yang akan dicapai dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan dalam suatu organisasi.

Prawirosentono (2017), memberi pandangan kata dalam bahasa Inggris untuk istilah kinerja tersebut, yakni "*performance*", yang memiliki beberapa *entries*. *Entries* disini yaitu: melakukan, menjalankan, melaksanakan, memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu nazar, menggambarkan suatu karakter dalam suatu permainan, menggambarkannya dengan suara atau alat musik, melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar dan sesuai dengan moral maupun etika". Rivai (2004) memberikan penjelasan mengenai kinerja bahwa ada beberapa pengertian mengenai kinerja yaitu: Kinerja merupakan seperangkat hasil kerja yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta. Sedangkan menurut Sutrisno (2010), kinerja adalah

hasil akhir dari suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang dari tingkahlaku kerjanya dalam melaksanakan aktifitas kerja.

Mohammad (Nawawi, 2013) kinerja merupakan tingkat efesiensi dan efektivitas serta inovasi dalam pencapaian tujuan oleh pihak manajemen dan devisi-devisi yang ada dalam organisasi. Kinerja suatu entitas manajemen pada dasarnya adalah menilai kemampuan setiap individu dan kolektif individu di organisasi untuk melaksanakan peran yang dimainkan dalam kegiatan keseharian organisasi. Dengan kinerja ini motivasi organisasi akan dirangsang kearah pencapaian visi dan misi organisasi. Kinerja pada tingkatan organisasi merupakan hubungan organisasi dengan para stakeholdernya. Sedangkan pada tingkatan proses, suatu organisasi akan dikatakan baik atau berhasil sangat terkait dengan prosesnya. Proses yang mengarah pada kinerja yang diinginkan adalah apabila proses tersebut sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan organisasi telah bekerja secara efisien, efektif sesuai dengan keinginan pelanggan.

Irwan (Sukmarwati, 2017) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang kongkrit, dapat diamati, dan dapat diukur. Mangkunegara (Rahman, 2017) menjelaskan bahwa kinerja berasal dari kata "*job performance*"(prestasi kerja) atau "*actual performance*"(prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang).

Chaizy Nasucha (Fahmi, 2010) mengemukakan bahwa kinerja organisasi merupakan efektivitas organisasi secara keseluruhan dalam memenuhi keinginan yang telah ditetapkan dari kelompok yang bersangkutan dengan beberapa usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisai secara terus menerus dalam pencapaian tujuan secara efektif. Inti dari pendapat ini yaitu bahwa untuk mendapatkan pencapaian sesuai dengan apa yang diharapkan maka diperlukan

adanya cara-cara tertentu yang dilakukan dalam hal peningkatan dari kemampuan orang-orang yang bekerja untuk mencapai tujuan. Berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai kinerja maka dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai kinerja yakni kinerja menyangkut suatu hasil pekerjaan yang telah digapai oleh seseorang baik dalam ruang lingkup pemerintahan maupun swasta yang dapat diukur dan dapat diamati dalam proses pencapaian tujuan yang efektif dan efisien.

2. Kinerja Individu dan Kinerja Organisasi

Lembaga pemerintahan ataupun swasta dapat dikatakan baik dalam pencapaian tujuannya harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang didalamnya terdapat sekelompok individu yang membantu satu sama lain dalam pencapaian suatu tujuan kelembagaan atau organisasi yang bersangkutan.

Tercapainya tujuan dari suatu lembaga bergantung pada upaya dari para individu yang terdapat dalam lembaga tersebut. Dalam hal ini ada relasi antara individu dengan lembaganya. Kinerja suatu karyawan dalam suatu instansi baik pemerintahan maupun swasta dapat dikatakan baik atau maksimal apabila karyawan tersebut mempunyai keahlian yang khusus, kinerja karyawan dapat dikatakan maksimal atau baik apabila karyawan tersebut memiliki keinginan serta tekak kuat dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan untuk mendapatkan gaji atau upah dari perusahaan sesuai dengan perjanjian, serta mempunyai harapan masa depan lebih baik.

3. Penilaian Kinerja

Sedarmayanti (2011), mengemukakan bahwa defenisi kata "*to appraise*" (menilai) adalah menetapkan harga untuk atau menilai suatu benda. Penilaian kinerja adalah prosedur apa saja yang meliputi:

- a. Penetapan standar kinerja.
- b. Penilaian kinerja aktual karyawan dalam hubungan dengan standar.
- c. Memberi umpan balik kepada karyawan dengan tujuan memotivasi karyawan untuk menghilangkan penurunan kinerja atau terus bekerja lebih giat. Melakukan komunikasi yang baik dengan karyawan dapat menunjang kinerja karyawan dalam proses pencapaian tujuan.

4. Mengevaluasi Kinerja

Whitmore (2014), memberikan penjelasan bahwa, kinerja merupakan pelaksanaan dari fungsi suatu tugas yang dituntut dari seseorang. Menurut Whitmore tugas yang dituntut dari seseorang harus ada hasil, meskipun dalam ukuran yang paling minim. Maksud dari pendapat tersebut diatas adalah dalam melaksanakan segala bentuk pekerjaan berdasarkan tugas dan tanggungjawab yang dimiliki oleh seorang karyawan maka secara otomatis dibutuhkan suatu hasil sebagai hasil akhir dari pekerjaan itu.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa yang harus dicapai oleh seseorang, haruslah melebihi dari apa yang diharapkan. Dengan demikian, menurut Whitmore mengemukakan bahwa kinerja merupakan suatu perbuatan, suatu prestasi yang diperlihatkan melalui keterampilan yang nyata.

5. Beberapa Kata Kunci Defenisi Kinerja

Sedarmayanti (2011), mengatakan bahwa ada beberapa kata kunci defenisi kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Hasil kerja
- b. Pekerja, proses atau organisasi
- c. Terbukti secara konkrit

- d. Dapat diukur
- e. Perbandingan dengan standar yang ditetapkan

6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Sutrisno (Ramadani, 2010) dalam jurnal yang sama mengemukakan bahwa kinerja seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

- a. Kemampuan, perangai, dan minat seorang pekerja. Artinya ada hal khusus yang dibutuhkan menyangkut keahlian dari seorang karyawan
- b. Kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peranan seorang pekerja. Menyangkut dengan tugas yang akan dilakukan.
- c. Tingkat motivasi kerja.

Simanjuntak (Widodo, 2015) mengemukakan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Kuliatas dan kemampuan pegawai yaitu hal hal yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, sikap mental, dan kondisi fisik pegawai
- b. Saran pendukung, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan kerja seperti kesehatan kerja, sarana produksi, keselamatan kerja, dan teknologi serta hal-hal yang berkaitan terhadap kesejahteraan para karyawan seperti pemberian gaji atau upah sesuai dengan perjanjian sebelumnya, memberikan jaminan sosial, serta keamanan dalam bekerja.

7. Indikator Kinerja

Nawawi (2013), secara konseptual Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengemukakan bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah

ditetapkan. Maksudnya ialah indikator kinerja membahas tentang pendeskripsian hasil pencapaian dari target yang telah ditetapkan baik dalam bentuk penjelasan secara mendetail maupun dalam bentuk data dan angka. Oleh karena itu, suatu indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat dihitung serta dapat diukur yang akan digunakan untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan (*ex-ante*), serta tahap pelaksanaan (*on-going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*). Dengan kata lain bahwa indikator kinerja juga dapat digunakan dalam proses penilaian suatu individu dalam sebuah organisasi dalam proses pencapaian hasil kerja suatu organisasi dengan berlandaskan pada tingkat keberhasilan organisasi tersebut dalam menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai mana telah dibahas dalam materi perencanaan strategis. Maka dari itu, tanpa adanya indikator kinerja sangat sulit bagi kita untuk menilai kinerja (berhasil atau tidak) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja pelaksanaannya. Nawawi (2013), mengemukakan bahwa dalam suatu organisasi terdapat jenis-jenis indikator kinerja antara lain, yaitu:

- a. Indikator masukan dalam hal ini menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa informasi, sumber daya manusia, dana, kebijakan/peraturan perundang-perundangan, dan sebagainya.
- b. Indikator proses menyangkut segala upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator proses adalah gambaran keseluruhan aktivitas yang dilakukan dalam suatu lembaga dalam

pencapaian tujuan khususnya dalam pengelolaan masukan menjadi keluaran.

- c. Indikator keluaran merupakan hasil akhir dari suatu proses pelaksanaan kegiatan.
- d. Indikator hasil merupakan gambaran dari berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- e. Indikator manfaat merupakan sesuatu yang berhubungan dengan hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- f. Indikator dampak berkaitan dengan segala sesuatu yang ditimbulkan meliputi keuntungan maupun kerugian pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Dwiyanto (Nawawi, 2013) memberikan penjelasan bahwa ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:

1. Produktivitas merupakan rasio antara input dan output atau perbandingan antara input (I, misalnya total gaji) dan output (O, misalnya laba kotor) persatuan waktu (T). jadi produktifitas kerja (PK) tiap hari adalah $PK=O/I$. secara filosofis produktifitas merupakan sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari sekarang.
2. Kualitas layanan merupakan indikator yang relative tinggi yang bias menjadi suatu ukuran kinerja birokrasi publik yang murah dan mudah digunakan. Kepuasan masyarakat bias menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik.

3. Responsibilitas merukan kemampuan birokrasi untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agernda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program pelayanana publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.
4. Akuntabilitas menunjuk seberapa besar kebijakan suatu kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang di pilih oleh rakyat. Asumsinya, para pejabat politik tersebut karrena dipilih oleh masyarakat, dengan sendirinya harus memprioritaskan kepentingan publik.

8. Elemen Kinerja

Pasolong (Fahmi, 2010) mengemukakan beberapa elemen kinerja antara lain, yaitu:

- a. Hasil pekerjaan yang dicapai secara individual atau secara institusi, yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-serndiri atau kelompok.
- b. Dalam pelaksanaan tugas, individu maupun lembaga dibebankan wewenang serta tanggung jawab, artinya individu maupun lembaga dibebankan hak serta kewenangan untuk ditindak lanjuti, sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik.
- c. Pekerjaan yang diberikan haruslah dikerjakan secara legal, artinya pelaksanaan kerja seseorang ataupun lembaga haruslah berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan.
- d. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, maksudnya dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan haruslah dikerjakan dengan penuh kejujuran serta ketaatan terhadap aturan yang telah ditetapkan.

B. Konsep Pungli (Pungutan Liar)

1. Pengertian Pungutan Liar (Pungli)

Ramadhani (2017), Pungutan Liar (Pungli) adalah pengenaan biaya ditempat yang tidak seharusnya dipungut biaya sama sekali. Pungli merupakan suatu singkatan dari pungutan liar, secara etimologis dapat dikatakan atau diartikan sebagai kegiatan pemungutan biaya atau meminta secara paksa. Sesungguhnya pungli merupakan sebuah istilah terhadap segala bentuk pemungutan biaya yang tidak legal, serta tidak berlandaskan aturan atau hukum yang berlaku, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai pungutan liar (pungli).

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU Nomor 3 1971, dan Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU Nomor 20 Tahun 2001 (memahami untuk membasmi), Peraturan Presiden (Perpres) No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, pengertian pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggaraan yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberi sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dari uraian tersebut diatas penulis menarik sebuah inti bahwa pungli merupakan kegiatan pemerasan ataupun pemungutan suatu biaya yang dilakukan oleh seseorang pada tempat atau lokasi yang tidak seharusnya dipungut biaya sama sekali yang menyebabkan kerugian pada satu pihak.

2. Pungutan Liar dalam Pandangan Hukum

Pungutan Liar (Pungli) merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum. Dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah diatur mengenai pungutan liar tersebut antara lain:

a. Pasal 368 KUHP

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

b. Pasal 418 KUHP

“seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya., bahwa hadiah atau janji itu di berikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungannya dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

c. Pasal 423 KUHP

“seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara meawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Menurut

ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 12 huruf e dari UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

Penjelasan beberapa pasal dalam KUHP yang mengakomodir tentang pungutan liar maka dapat disimpulkan bahwa pungli termasuk kedalam kategori korupsi dimana pemungutan yang dilakukan tidak berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan.

3. Unsur-unsur Pungutan Liar

Pungutan liar terdiri atas unsur-unsur obyektif dan subjektif antara lain,

- a. Unsur-unsur Objektif, unsur-unsur objektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah sebagai berikut:
 1. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara (*deambtenar*)
 2. Menyalahgunakan kekuasaan (*misburik van gezag*)
 3. Memaksa seseorang (*iemand dwingen om*) untuk memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri.
- b. Unsur-unsur Subjektif, unsur-unsur subjektif dalam hal ini adalah diatur dalam rumusan korupsi Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah: Melakukan suatu tindakan dengan maksud

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum serta menguntungkan diri pribadi secara melawan hukum.

4. Faktor Penyebab Pungutan Liar

Umumnya, pungutan liar dilakukan petugas layanan publik berkategori birokrat kelas rendah. Terjadinya pungutan liar dalam suatu birokrasi publik dipengaruhi oleh beragam alasan lain seperti gaji yang didapatkan para aparat yang jauh dari kata memuaskan merupakan faktor yang paling sering memicu aparat melakukan pungli. Bila birokrat tingkat tinggi bias melakukan suatu korupsi untuk menambah penghasilan, maka birokrat tingkat bawah melakukan pungutan liar untuk menambah penghasilannya. Lemahnya pengawasan yang dilakukan serta adanya kesempatan untuk melakukan pungli merupakan faktor utama para pelaku pungli untuk melakukan pungutan liar (Ramadani, 2017).

Posisi masyarakat dalam proses pelayanan publik sangatlah sering menjadi korban dari pungutan liar karena daya tawar yang rendah. Masyarakat “dipaksa” sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Masyarakat juga tidak mendapatkan lembaga pengaduan yang bonafid karena rendahnya kepercayaan dari masyarakat terhadap citra para birokrat. Selain itu pengaduan masyarakat kerap kali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari inspektorat sebagai pengawas internal. Pada sisi lain masyarakat juga kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungutan liar dengan cara membiasakan memberi uang tanpa mampu bersikap kritis tanpa mampu melakukan penolakan pembayaran diluar dari biaya resmi. Budaya “memberi” masyarakat untuk melancarkan urusan dengan birokrat susah untuk dihilangkan karena telah berlangsung selama beabad-abad.

Sejak zaman feodal, masyarakat terbiasa “memberi” upeti kepada raja dan aparat kerajaan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar adalah:

- a. Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
- b. Faktor mental, karakter atau kelakuan dari seorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
- c. Faktor ekonomi, penghasilan dibawa rata-rata dan tidak sesuai dengan jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungutan liar.
- d. Faktor kultural dan budaya organisasi, Budaya yang terbentuk disuatu suatu lembaga yang terdapat pungutan liar dan penyuaapan secara terus menerus dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal yang biasa.
- e. Terbatasnya sumber daya manusia,
- f. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan.

C. Saber Pungli

1. Pembentukan Saber Pungli

Saber Pungli terbentuk karena pertimbangan bahwa pungutan liar (Pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar pemerintah memandang perlu dibentuk suatu Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Setgas Saber Pungli/Tim Saber Pungli). Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Jokowi pada tanggal 20 Oktober 2016 telah menandatangani suatu

peraturan No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang sering disebut sebagai Tim Saber Pungli yang berkedudukan dibawa tanggung jawab Presiden,”bunyi Pasal 1 Ayat (2) Perpres. Tim Saber Pungli dalam Perpres ini mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah. Menurut Perpres No 87 Tahun 2016, Tim Saber Pungli menyelenggarakan suatu fungsi Intelijen, Pencegahan, Penindakan, dan Yustisi.

2. Wewenag Setgas Saber Pungli

Wewenag dari Saber Pungli adalah sebagai berikut:

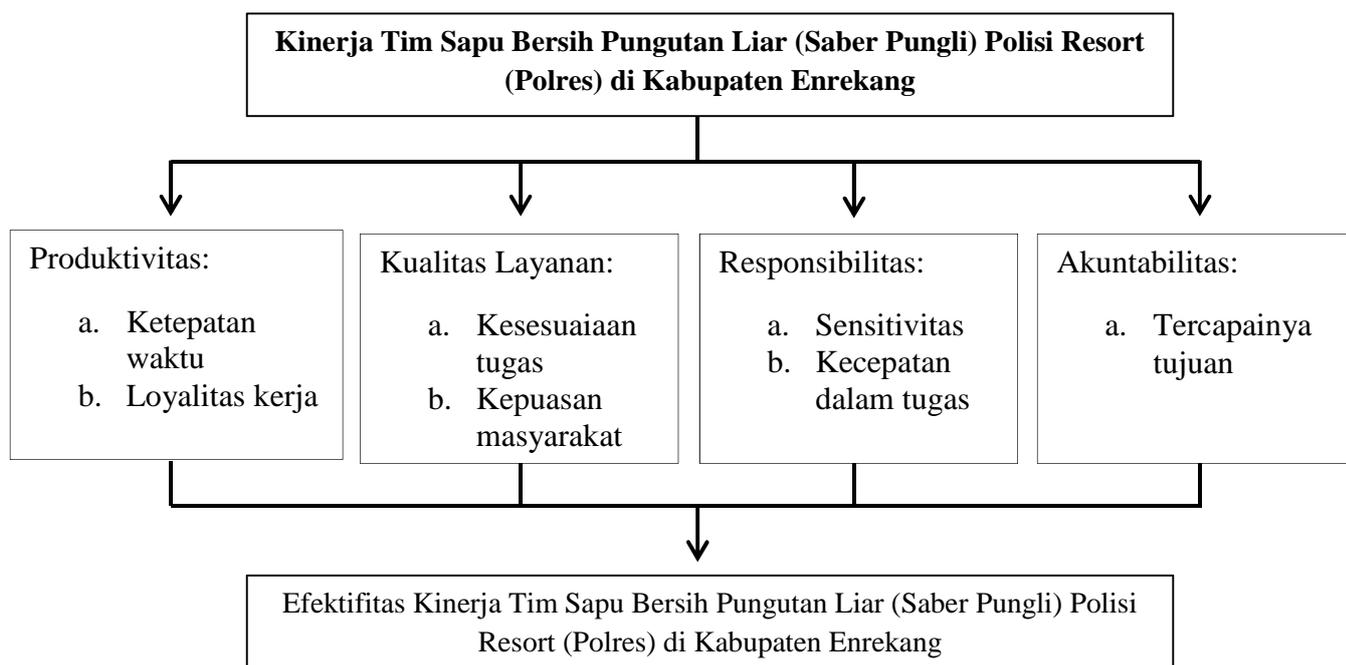
- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian atau lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. Melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT);
- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian atau lembaga, serta kepada pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber Pungli di setiap instansi;

D. Kerangka Pemikiran

Kinerja karyawan dalam suatu instansi dapat terlihat melalui suatu pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja yang digunakan dalam pengukurannya,

Dwiyanto (Nawawi, 2013) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu: Produktivitas digunakan untuk melihat rasio antara input dan output atau perbandingan antara input, kualitas layanan digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima layanan, tanggung jawab digunakan untuk mengukur kemampuan birokrasi untuk mengenal kebutuhan masyarakat, akuntabilitas menunjuk seberapa besar kebijakan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang di pilih oleh rakyat. Maka dalam penyusunan penelitian ini penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar Kerangka Pikir



Gambar 1.3 : Kerangka Pikir

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang diangkat berdasarkan kerangka pikir diatas adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas.
2. Kualitas pelayanan.
3. Responsibilitas.
4. Akuntabilitas.
5. Efektifitas

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Produktivitas adalah usaha yang dilakukan oleh para personil dalam pelaksanaan tugas yang didukung oleh motivasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas yang diperoleh melalui pelatihan. Produktifitas yang meningkat berarti performa yang baik, dalam hal ini produktifitasa diukur berdasarkan indikator yang meliputi:
 - a. Ketepatan waktu
 - b. Loyalitas kerja para anggota tim.
2. Kualitas pelayanan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang dibarengi dengan keinginan masyarakat serta ketepatan cara pelayanan agar dapat memberi kepuasan kepada masyarakat. Dalam hal ini kualitas pelayanan dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:
 - a. Kesesuaian tugas.
 - b. Kepuasan masyarakat.
3. Responsibilitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara pekerjaan dengan keinginan masyarakat. Responsibilitas dalam hal ini menggunakan indikator:
 - a. Kepekaan dari tim Saber Pungli.
 - b. Kecepatan dari tim Saber Pungli dalam pelaksanaan tugas.

4. Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun sub indikatornya yaitu tercapainya tujuan dari tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang.
5. Efektivitas merujuk pada sejauh mana tingkat efesensi dari tim Saber Pungli dalam menyelesaikan kasus-kasus pungutan liar yang terjadi di Kabupaten Enrekang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dalam penelitian ini akan dimulai selama dua bulan setelah seminar proposal dan lokasi penelitiannya berada di Kabupaten Enrekang. Alasan memilih lokasi tersebut karena di Kabupaten Enrekang telah terjadi kasus pungutan liar yang menjadi permasalahan sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana kinerja dari Tim Saber Pungli dalam menangani kasus pungutan liar di Kabupaten Enrekang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Bodgan dan Taylor (Suwardi, 2008) mendefenisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Sedangkan pada penelitian ini akan memberikan penjelasan yang berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja dari Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Kabupaten Enrekang, maka jenis penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif kualitatif.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah tipe fenomenologi dimaksud untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami informan.

Adapun masalah yang diteliti adalah mengenai bagaimana kinerja dari Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Kabupaten Enrekang.

C. Sumber Data

Ulum (2016), mengatakan bahwa sumber data merupakan asal darimana anda memperoleh data-data. Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara dan juga hasil observasi langsung yang dilakukan. Jenis data yang ingin diperoleh adalah mengenai bagaimana kinerja dari Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Kabupaten Enrekang, serta data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan proposal.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian. Adapun laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah data yang berasal dari jurnal, koran, buku, dan majalah atau sumber-sumber yang lainnya yang dapat mendukung data yang diperlukan dalam proses penelitian.

D. Informan Penelitian

Bungin (2011), mengemukakan bahwa informan adalah orang yang, diminta informasi dan diwawancarai oleh pewawancara. Dalam hal ini informan yang diwawancarai adalah orang yang menguasai dan memahami data, informasi serta realita suatu objek yang diteliti oleh peneliti dalam suatu penelitian. Informan

dalam penelitian ini ditetapkan secara *purposivesampling* yaitu memilih dengan sengaja informan yang akan di mintai informasi. Berdasarkan pertimbangan bahwa merekalah yang memahami masalah yang sedang dipersoalkan dalam penelitian ini agar mendapat data yang akurat. Adapun informan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 : Tabel Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Inisial	Jumlah
1	Asis Taba	Ketua Tim Saber Pungli Kab. Enrekang	AT	1 Orang
2	Pardi dan Anwar	Anggota Tim Saber Pungli Kab. Enrekang	P dan A	2 Orang
3	Arham Makmur dan Panji Jawang	Anggota Polres Kab. Enrekang	A dan PJ	2 Orang
4	Sulfiati, Hajar, Basri, Nas, dan Sitti Halima	Masyarakat	S, H, B, N, dan SH	5 Orang
Jumlah				10 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti agar dapat memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Hadi (Sugiono, 2013) mengemukakan bahwa observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam kegiatan observasi, seorang peneliti turun langsung kelapangan serta terlibat langsung dengan keseharian dengan orang atau objek yang sedang diamati atau diteliti sebagai sumber data penelitian.

Teknik observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan yang merupakan lokasi tempat dimana objek penelitian berada. Dalam penelitian ini dilakukan adalah pengamatan langsung terhadap aktifitas dari Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) dalam menyelesaikan masalah pungutan liar yang terjadi di Kabupaten Enrekang.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan teknik bertemu muka atau berbicara dengan narasumber secara langsung atau sering juga disebut sebagai informan yang diambil sebagai perwakilan yang benar-benar mewakili untuk proses penelitian oleh peneliti untuk menghindari perolehan data yang subjektif di Kabupaten Enrekang yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyediakan dokumen-dokumen yang disertai dengan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/penulis, buku, dan Undang-Undang ataupun artikel-artikel yang mendukung keaslian data atau dokumen.

F. Teknik Analisis Data

McDrury (Moleong, 2014) menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data artinya merangkum data, menyeleksi data yang pokok, terfokus pada data yang dianggap penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam hal ini

gambaran tentang kinerja dari Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Kabupaten Enrekang, sehingga peneliti dalam melakukan pengumpulan data sebelumnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penelitian kualitatif menggunakan penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menguraikan secara singkat tentang bagaimana kinerja dari Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Kabupaten Enrekang, penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*)

Langkah ketika dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan suatu kesimpulan dalam peneliti kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah diteliti. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek dalam hal ini kinerja dari Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Kabupaten Enrekang.

G. Pengabsahan Data

Moleong (2014), mengemukakan bahwa pengabsahan data adalah bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang berukuran benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang cepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang didapatkan yang berguna untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang didapatkan. Pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi terbagi atas tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu pengecekan ulang suatu informasi yang didapatkan melalui sumber yang berbeda. Misalnya melakukan perbandingan antara pengamatan langsung di lapangan dengan hasil wawancara yang didapatkan dari informan, kemudian membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada untuk melihat perbedaan dan kesamaan pendapat yang dapat dilihat dari hasil wawancara dan dokumen.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidak akuratannya.

3. Triangulasi Waktu

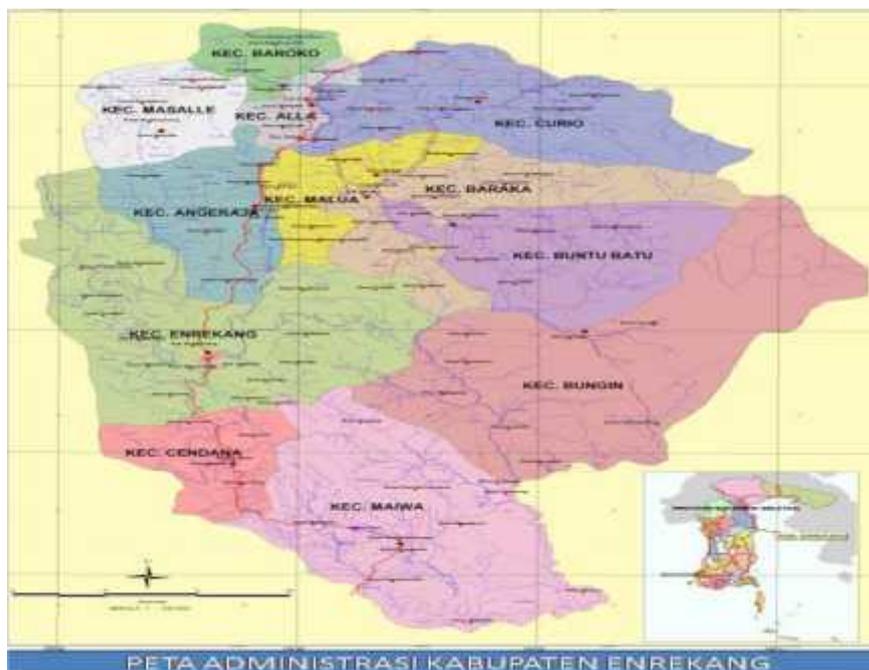
Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan mencocokkan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu dilakukan suatu pengamatan secara berulang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Peneliti

Kabupaten Enrekang yang sejak abad XIV dikenal dengan sebutan Massenrempulu yang berarti “menyusur gunung” dengan ibu kotanya adalah Enrekang dan merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai keunikan tersendiri karena terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit yang sambung-menyambung sekitar 85% dari luas wilayahnya. Sebutan Enrekang berasal dari kata Endeg yang berarti naik atau panjat, dari sinilah asal mula sebutan ENDEKAN. Masih ada versi lain yang ada dalam pengertian umum sampai sekarang dan bahkan ada dalam administrasi pemerintah yang lebih dikenal dengan sebutan ENREKANG. Adapun gambaran Kabupaten Enrekang dapat dilihat dari Peta berikut ini:



Gambar 2.3 : Peta Wilayah Kabupaten Enrekang

1. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Enrekang terletak sekitar ± 240 Km dari Utara Kota Makassar atau secara geografis terletak antara $3^{\circ} 14'36'' - 3^{\circ} 50'0''$ Lintang Selatan dengan $119^{\circ} 40'53'' - 120^{\circ} 6'33''$ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang, Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Pinrang.

Secara umum bentuk topografi wilayah Kabupaten Enrekang terbagi atas wilayah perbukitan karst (kapur) yang terbentang dibagian utara dan tengah, lembah-lembah yang curam, sungai serta tidak mempunyai wilayah pantai. Jenis flora yang banyak ditemukan pohon *bitti* atau yang biasa disebut *vitex cofasus*, pohon hitam Sulawesi atau *diospyros celebica*, pohon ulin/kayu besi, kayu bayam, kayu agatis, rotan tohiti, rotan taman, serta kayu kuning. Jenis angrek juga banyak ditemukan serta memiliki beragam jenis seperti *goodyera celebica*, angrek Sulawesi dari spesies *phalanopsis venosa*, angrek kalajengking *arachnis celebica*, angrek *pleomele*, angrek *cymbidium finalaysonianum*, dan jenis tanaman lainnya.

2. Batas dan Luas Wilayah

Kabupaten Enrekang secara administrasi terdiri dari 12 kecamatan yang tersebar dalam 112 desa dan 17 kelurahan dan memiliki luas wilayah sekitar $1.786,01 \text{ Km}^2$ atau 178.601 Ha. Luas wilayah Kabupaten Enrekang adalah $\pm 2,86$ persen dari wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan pegunungan latimojong yang mempunyai ketinggian ± 3.000 Meter di atas permukaan laut yang membentang panjang menjadi pagar pembatas Kabupaten Enrekang dari Utara Ke

Selatan sedangkan di sebelah barat dan Timur terbentang sungai saddang yang pengendalian airnya menentukan pengairan di wilayah Kabupaten Pinrang dengan aliran sungai sampai ke Kabupaten Sidenreng Rappang. Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 Wilayah Kecamatan di antaranya Kecamatan Cendana, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Baraka, kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Malua, Kecamatan Alla, Kecamatan Curio, Kecamatan Masalle, kecamatan Baroko, Kecamatan Bungin dan Kecamatan Anggeraja. Yang keseluruhannya terdapat dalam wilayah kecil yang terdiri dari 129 Desa/kelurahan.

3. Geomorfologi

Kondisi Topografi Kabupaten Enrekang di tandai dengan bentuk wilayah yang datar hingga bergunung, daerah yang datar dapat di jumpai di sekitar Kecamatan Maiwa dan aliran sungai-sungai utama serta dataran di sekitarnya lebih didominasi oleh daerah berbukit. Kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Enrekang bervariasi dari daerah datar (0-2%) hingga yang sangat curam (>40%). Kemiringan lereng yang paling dominan adalah 15-40% meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Enrekang. Untuk wilayah dengan kemiringan >40% merupakan wilayah terkecil.

4. Aspek Kependudukan

Penduduk asli Kabupaten Enrekang terdiri dari suku bugis dengan karakteristik bahasa yang dapat di bedakan atas tiga bahasa yaitu bahasa Duri, bahasa Maiwa, dan bahasa Enrekang. Wilayah yang menggunakan karakteristik bahasa Duri adalah Kecamatan Malua, Curio, Anggeraja, Alla, Baraka, Baroko, Buntu Batu dan kecamatan Masalle wilayah dengan bahasa Enrekang adalah Kecamatan Enrekang

dan cendana sedangkan yang menggunakan bahasa Maiwa adalah Kecamatan Maiwa dan Bungin.

Jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Enrekang sangat bervariasi setiap tahunnya sekitar jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 195,402 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 97.889 dan perempuan sebanyak 97.513 jiwa.

B. Gambaran Umum Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang

1. Visi dan Misi Setgas Saber Pungli Kab. Enrekang

a. Visi:

Terwujudnya pelayanan publik pada Kementrian/Lembaga dan Pemerintahan daerah yang terbebas dari pungutan liar.

b. Misi:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar
2. Membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli pada tata pemerintahan dan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberantasan pungutan liar.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik melalui transparansi dan standarisasi pelayanan sesuai peraturan perundangan dan menghapuskan pungutan liar.

2. Tugas dan Fungsi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Enrekang

Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang melibatkan unsur penegak hukum yang terdiri dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Inspektorat serta Kodim 1419 yang saling bekerja sama dalam memberantas pungutan liar di Kabupaten Enrekang. Adapun

tugas serta fungsi dari aparat Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

- a. Pembina, melakukan pembinaan atas pelaksanaan tugas unit Satgas Saber Pungli.
- b. Penanggung jawab, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli
- c. Pelaksana:
 1. Membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan daerah.
 2. Melaporkan kegiatan Satgas kepada Pembina secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal bersifat khusus dan kontijensi.
 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Satgas
 4. Melaksanakan Komando, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh unit Satgas
- d. Sekretaris, membantu pelaksana tugas Ketua Pelaksana Satgas dalam Administrasi Umum, keuangan, penyediaan data dan informasi.
- e. Kelompok Kerja (POKJA)
 1. Kelompok kerja (POKJA) Unit Intelejen
 - a. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli.
 - b. Melakukan kegiatan penyusupan, electing dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan.
 - c. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua pelaksana Satgas.

- d. Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satgas Sapu Bersih dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Satgas.
 - e. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik.
2. Kelompok kerja (POKJA) Unit Pencegahan melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya Pungli.
 3. Kelompok kerja (POKJA) unit penindakan melakukan upaya-upaya represif (OTT) terhadap pelaku Pungli di seluruh Instansi terkait daerah yang memberikan pelayanan publik.

3. Susunan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)

Kabupaten Enrekang

A. Pembina :

1. Bupati Enrekang
2. Wakil Bupati Enrekang
3. Kapolres Enrekang
4. Kajeri Enrekang
5. Dandim 1419 Enrekang
6. Ketua Pengadilan Negeri Enrekang

B. Penanggung Jawab : Sekertaris Daerah Kabupaten Enrekang

C. Kertua Pelaksana : Wakapolres Enrekang

D. Wakil ketua

Wakil I : Inspektur Kabupaten Enrekang

Wakil II : Kasubang Bin Kejari Enrekang

E. Sekertaris

1. Seksi Pengawasan

Sekertaris : Ka Siwas Polres Enrekang

Anggota : Bripda Suharian Irianto, S (Polres Enrekang)

2. Seksi Sarana Prasarana

Sekertaris : Paur Log Polres Enrekang

Anggota : Brigpol Irfan (Polres Enrekang)

3. Seksi Umum

Sekertaris : Kasium Polres Enrekang

Anggota : Pardi, S. Pd (Inspektorat)

4. Seksi Keuangan

Sekertaris : Kasi Keu Polres Enrekang

Anggota : Darmiati, S. Sos (Ispektorat)

: Brigpol Agam Para Satria (Polres Enrekang)

:Sri Rahayu, S. SE (Inspektorat)

5. Seksi Teknologi Informasi Polisi

Sekertaris : Kasitipol Polres Enrekang

Anggota : Bripda Arham Maskur (Polres Enrekang)

F. Kelompok Kerja Unit Inteligen

Ketua : Kasi Intel Kejaksaan Negeri Enrekang

Sekertaris : Kepala Satpol PP – DAMKAR Kab. Enrekang

Anggota : Kabid Kewaspadaan Nasional, Bela Negara dan
Ketahanan Ekonomi Badan Kasbangpol.
: Usman, SH
: Fri Harmoko (Jaksa Fungsional)

G. Kelompok Kerja Unit Pencegahan

Ketua : Kasat Bimnas Kabupaten Enrekang
Sekertaris : Kepala Dishub Kab. Enrekang
Anggota : Irban Pengaduan Masyarakat
: Bribda Faisal
: H. Dedi (Auditor Inspektorat)
: Kasubang Perencanaan Inspektorat

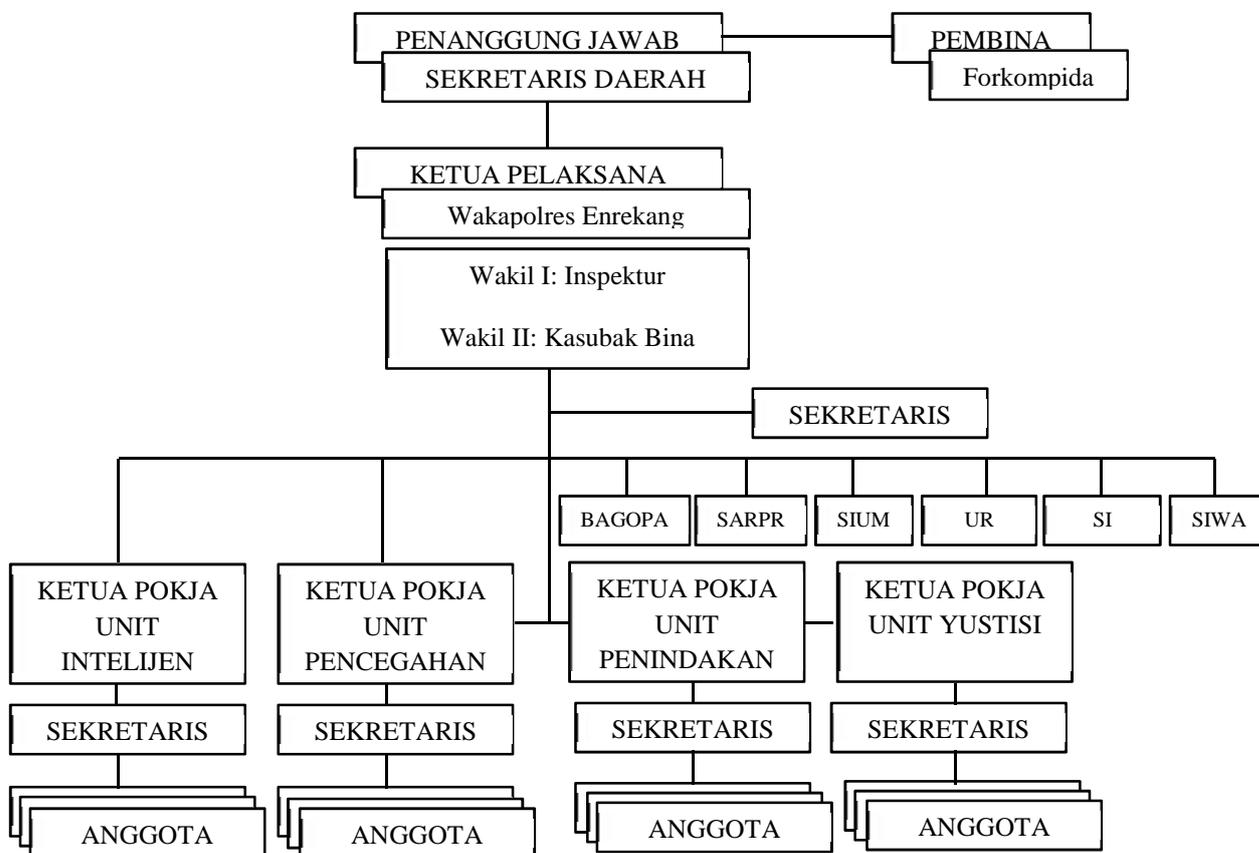
H. Kelompok Kerja Unit Penindakan

Ketua : Kasat Reskrim Polres Enrekang
Sekertaris : Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Enrekang
Anggota : Kas Propam Polres Kabupaten Enrekang
: Pelda Abd. Kadir (Propos Kodim Enrekang)
: Brigpol Aris, T (Polres Enrekang)

I. Kelompok Kerja Unit Yustisi

Ketua : Kabag Hukum Setda
Sekertaris : Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri
Anggota : Timur Agung Nugroho, SH., M. Hum (Hakim)
: Anwar S. Pd., SH (Panitera Pengadilan Negeri)
: Sertu Mansyur (Provost Kodim 1419 Enrekang)
: Munir, SH (Kasubang Kepegawaian)

Struktur Organisasi Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang



Gambar 3.3: Struktur Organisasi Tim Saber Pungli Kab. Enrekang

Anggara Pengendalian dan Pengawasan Pungutan Liar (Pungli) Kab.

Enrekang Tahun 2017-2018

NO	RINCIAN KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	Ket
1	Honorarium Panitia Pelaksasn Kegiatan	Rp. 64.800.00	Rp. 64.800.000	
2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 2.023.803	Rp. 2.023.450	
3	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Rp. 1.500.000	Rp. 1.499.000	
4	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp. 18.050.000	Rp. 18.050.000	
JUMLAH		Rp. 86.373.803	Rp. 86.372.450	

**Tabel 2.2 : Tabel Anggaran Pengendalian dan Pengawan Tim Saber Pungli Kab.
Enrekang**

No	Rincana Kegiatan	Rencana	Realisasi				Ket
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	Honor PANitia Pelaksana	Rp. 51.600.000	-	-	-	-	
2	Honor Tenaga Ahli	Rp. 70.000.000	Rp. 16.950.000	-	-	-	
3	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 5.621.489	Rp. 2.031.454	-	-	-	
4	Belanja Cetak	Rp. 5.000.000	Rp. 950.000	-		-	
5	Belanja Konsumsi Kegiatan	Rp. 10.000.000	Rp. 1.627.000	-		-	
6	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	Rp. 12.000.000	-	-	-	-	
7	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 100.000.000	Rp. 11.700.000	-	-	-	
8	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah	Rp. 100.000.000	Rp. 6.954.000	-	-	-	
JUMLAH		RP. 352.221.489	Rp. 40.212.450	-	-	-	

C. Kinerja Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Enrekang

Pengukuran kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja serta penetapan capaian indikator kinerja. Dalam hal ini kinerja dari Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang dinilai dengan menggunakan indikator produktivitas, kepuasan masyarakat, responsibilitas, dan akuntabilitas.

1. Produktivitas

Produktivitas merupakan ukuran yang diberikan dalam menyatakan sejauh mana tingkat keberhasilan dari sebuah proses pencapaian hasil dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada secara optimal. Produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran (barang-barang atau jasa) dengan masukan (tenaga kerja, bahan, uang). Produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masukan. Masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik, bentuk, dan nilai. Tohardi (Edy Sutrisno:2012), mengemukakan bahwa produktivitas kerja merupakan sikap mental, sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap apa telah ada. Suatu keyakinan bahwa orang dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Adapun hal penting agar dapat meningkatkan produktivitas dari Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang yaitu dengan menggunakan indikator ketepatan waktu serta loyalitas kerja.

a. Ketepatan Waktu

Ketepatan artinya mengenai sasaran, mencapai tujuan, dan bebas dari kesalahan. Dalam hal ini ketepatan waktu merupakan sebuah keterampilan yang dengan segala aktivitas serta tindakan yang dikerjakan dengan terencana agar dapat melakukan pemanfaatan waktu dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta tidak melenceng dari pada aturan yang berlaku sehingga tercipta produktivitas yang tinggi dari setiap individu.

Hasil wawancara dengan AT sebagai Ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang dalam kaitannya dengan ketepatan waktu Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang menjelaskan bahwa:

“iya, tim saber pungli selalu melaksanakan tugasnya secara tepat waktu seperti halnya dalam menerima laporan yang masuk maka kami sebagai aparat yang bertugas khusus akan segera mengambil tindakan dengan cara terjun langsung ke lokasi kejadian”.

(Hasil wawancara dengan AT, 3 September 2018 Jam 13:20 Wita).

Inti dari jawaban informan diatas menunjukkan bahwa sebagai aparat yang bertanggung jawab langsung dalam penanganan pungutan liar maka dalam hal kegiatan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang harus tepat waktu dalam pelaksanaannya, seperti halnya saat menerima pengaduan dari masyarakat maka mereka langsung pergi ke lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan.

Senada dengan pernyataan yang diberikan oleh A selaku anggota dari Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:

“... disini kami selalu tepat waktu,... Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang telah melaksanakan tugasnya dengan tepat,... seperti kasus yang kami dapatkan di pasar sentral dan langsung melakukan penangkapan kepada pelaku, namun kurangnya partisipasi dari masyarakat yang menjadi kendala dari kami saat akan melaksanakan tugas seperti kurangnya pelaporan dari masyarakat terkait

dengan tindakan pungutan liar, dan untuk memperbaiki masalah itu,.. kami kemarin melakukan sosialisasi khususnya di sekolah-sekolah karena saat ini kan musimnya itu banyak penerimaan siswa baru, itu gunanya untuk memberikan pemahaman kepada para gurunya serta siswanya bahwa pungli itu tidak baik.”.

(Hasil wawancara dengan A, 3 September 2018 Jam 14:30 Wita).

Uraian hasil wawancara dengan A selaku anggota Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa dalam hal pelaksanaan tugas ketepatan waktu yang dimiliki oleh Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang sudah baik namun terkendala oleh kurangnya partisipasi dari pihak masyarakat dalam memberikan laporan pengaduan tindakan pungutan liar kepada petugas, dengan adanya masalah tersebut maka untuk mengatasinya maka dilakukan suatu sosialisasi dalam memberikan pemahaman tentang pungutan liar khususnya pada daerah rawan pungli seperti sekolah pada saat penerimaan siswa baru.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang diungkapkan oleh P sebagai anggota Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang yang mengemukakan bahwa:

“seperti yang kita ketahui bahwa pungli itu sifatnya merugikan baik dalam kalangan masyarakat maupun pada instansi pemerintahan maka dari itu, kami selaku tim saber pungli mengutamakan agar selalu tepat waktu dalam hal melaksanakan tugas agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan pungli itu”.

(Hasil wawancara dengan P, 4 September 2018 Jam 09:00 Wita).

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian jawaban informan diatas menunjukkan bahwa pungutan liar atau pungli sifatnya sangat merugikan maka Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang selalu mengusahakan untuk dapat tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat yang menangani kasus pungutan liar di Kabupaten Enrekang baik pada ruang lingkup masyarakat maupun lingkup pemerintahan karena pungutan liar sangat meresahkan masyarakat.

Berbeda dengan wawancara dengan PJ sebagai anggota Polres Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“menurut sepengetahuan saya tim saber pungli itu dalam melaksanakan tugasnya itu berpatokan kepada pengaduan masyarakat dan laporan dari intel dari Polres, jadi jika ada pengaduan maka pada saat itu juga mereka langsung beroperasi, tapi yang menjadi masalahnya belum ada kasus yang berasal dari pengaduan masyarakat”.

(Hasil wawancara dengan PJ, 5 September 2018 Jam 10:25 Wita).

Hasil wawancara dengan salah satu anggota dari Polres Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa kegiatan pelaksanaan tugas berdasar pada laporan dari intel yang ditugaskan dari pihak kepolisian serta pengaduan langsung dari masyarakat namun kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam memberikan pengaduan terkait dengan pungutan liar menjadi salah satu kendala yang didapatkan oleh Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan tugasnya`.

Lain halnya dengan pandangan yang diberikan oleh AM sebagai anggota Polres Kabupaten Enrekang yang memberikan penjelasan bahwa:

“jika dilihat dari segi ketepatan dapat saya katakan bahwa mereka sebagai tim Saber mampu untuk dapat memanfaatkan waktu yang diberikan dalam melakukan penangkapan kepada pelaku yang melakukan pungutan liar seperti aksi yang mereka lakukan kemarin yang menangkap para pemuda yang melakukan parkir liar di daerah pasar”.

(Hasil wawancara dengan AM, 5 September 2018 Jam 11:28 Wita).

Wawancara dengan informan diatas mengenai ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas dapat disimpulkan bahwa daalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab dari Tim Saber Pungli telah berjalan dengan baik dengan segera melakukan suatu tindakan jika terdeteksi adanya suatu pungutan liar.

Berkaitan dengan pendapat yang diberikan oleh salah satu anggota masyarakat SH yang mengatakan bahwa:

“dalam penyelesaian kasus yang diberikan oleh tim Saber Pungli memakan waktu yang relatif lama karena anggota dari tim saber yang tidak memiliki kesatuan yang utuh yang mengakibatkan pelayanannya yang kurang tepat waktu”.

(Hasil wawancara dengan SH 5, September 2018 Jam 13:00 Wita).

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pendapat diatas adalah hambatan yang menjadi permasalahan pelaksanaan tugas dari tim Saber Pungli yaitu tidak adanya kesatuan yang utuh dari Tim Saber Pungli sehingga seringkali dalam pelaksanaan tugasnya mmenjadi terhambat, maka harus dibentuk suatu kesatuan yang utuh dalam melakukan pelaksanaan tugas dan pembagian kerja yang baik agar dapat tercipta ketepatan waktu yang baik.

Hasil wawancara dengan B masyarakat Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“layanan yang diberikan oleh tim Saber pungli sudah baik karena mereka selaku penegak hukum yang menagani kasus pungutan liar sudah mengurangi angka pungutan liar yang ada di Kabupaten Enrekang khususnya daerah sekitar pasar yang ada di Kabupaten Enrekang”.

(Hasil wawancara dengan B, 5 September 2018 Jam 14:30 Wita).

Jawaban informan diatas mengenai ketepatan waktu dari Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketepatan waktu telah dicapai oleh tim dalam melakukan suatu tugas sehingga telah terjadi suatu proses pelayanan yang baik, satuan tim tersebut telah mampu memberikan keuntungan karena sejak terbentuknya Tim Saber Pungli dapat mengurangi angka pungutan liar yang ada di Kabupaten Enrekang.

Tidak jauh berbeda dengan informasi yang diberikan oleh H masyarakat Kabupaten Enrekang yang berbunyi:

“iya... mereka tepat waktu sekali karena pungli itu sering terjadi di sekitar pasar sentral dan mereka langsung saja datang dan menangkap orang itu dan langsung membawa mereka ke kantor polisi”.

(Hasil wawancara dengan H, 5 September 2018 Jam 16:28 Wita).

Bunyi penjelasan dari informan diatas menunjukkan bahwa dalam melakukan penanganan kasus pungutan liar telah terlaksana dengan tepat dan cepat dengan cara langsung melakukan operasi penangkapan terhadap pelaku pungli dan menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti.

Sama halnya dengan penjelasan yang diberikan oleh N masyarakat Kabupaten Enrekang yang berbunyi:

“setahu saya selama ini mereka telah tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya,...hemm, bukan sekedar tepat waktu tapi juga tepat sasaran seperti kemarin waktu ada kasus pungli di pasar”.

(Hasil wawancara dengan N, 6 September 2018 Jam 13:00 Wita).

Inti dari jawaban yang diberikan informan diatas adalah dalam pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang telah tepat waktu dan dalam penganannya telah tepat sasaran karena benar-benar telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya sebagai aparaturnya yang menangani kasus pungutan liar.

Sama halnya dengan informasi yang diberikan oleh S masyarakat Kabupaten Enrekang yang berbunyi:

“tim Saber itu kemarin melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi katanya... karena katanya penerimaan siswa baru itu rawan terjadi pungli,.. saya kira hal itu sudah tepat untuk mengurangi pungli”.

(Hasil wawancara dengan S, 6 September 2018 Jam 08:00 Wita).

Kesimpulan dari jawaban informan S diatas menunjukkan bahwa dengan melakukan suatu sosialisasi ke sekolah-sekolah pada saat poenerimaan siswa baru merupakan tindakan yang tepat dalam mengurangi angka pungutan liar di Kabupaten Enrekang.

Kesimpulan yang dapat kita tarik dari semua jawaban yang diberikan oleh informan adalah ketepatan waktu pelaksanaan tugas dari para aparaturnya dari Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang sudah baik namun harus dibenahi lagi karena masih adanya masyarakat yang tidak tahu akan adanya tim yang bertugas khusus menangani masalah pungutan liar maka harus ditingkatkan lagi sosialisasinya dengan masyarakat agar masyarakat dapat mengenal jauh tentang Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang agar dapat dengan mudah untuk membuat masyarakat melakukan pengaduan terhadap tindakan pungutan liar yang ada sehingga kinerja pelaksanaan tugas serta penangkapan dapat berjalan dengan baik.

b. Loyalitas Kerja

Loyalitas adalah sifat rela berkorban dan jiwa pengabdian terhadap instansi, bangsa, Negara, dan taat serta setia dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Loyalitas kerja sangat diperlukan karena akan mendorong totalitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan sikap loyalitas yang tinggi atas pekerjaan akan timbul semangat untuk mengabdikan diri bagi kepentingan yang lebih besar. Loyalitas kerja merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang dibarengi dengan keinginan masyarakat serta ketetapan cara pelayanan agar dapat tercipta rasa puas kepada masyarakat sebagai pihak penerima layanan.

Penjelasan AT terkait dengan loyalitas para anggota Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“anggota dari Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang sangat loyal atas tugas yang diberikan, karena dimana kami sebagai suatu petugas yang menangani langsung kasus pungutan liar yang bekerja sama dengan beberapa elemen sangat sadar akan tugas dan tanggu jawab yang diamatkan masyarakat kepada kami”.

(Hasil wawancara dengan AT, 3 September 2018 Jam 13:20 Wita).

Hasil wawancara dengan AT selaku ketua dari Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa para aparat dari Tim Saber Pungli sangat menjunjung tinggi sikap loyalitas dimana para anggota Tim Saber Pungli memiliki kesadaran yang tinggi akan tugas dan fungsinya sebagai satuan yang dibentuk khusus untuk menangani masalah pungutan liar di Kabupaten Enrekang.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang diberikan oleh P selaku anggota Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:

“iya, kami sangat loyal terhadap tugas kami sebagai anggota yang menagani kasus pungutan liar, seperti halnya saat kami ada kegiatan di posko dan saat ada laporan dari masyarakat terkait dengan pungutan liar maka kami dahulukan apa yang menjadi tugas kami yaitu dengan langsung ke lapangan untuk tindakan pencegahan”.

(Hasil wawancara dengan P, 3 September 2018 Jam 15:55 Wita).

Kesimpulan dari pendapat informan diatas adalah sikap cinta atas pekerjaan dari anggota tim dari Saber Pungli Kabupaten Enrekang sangat baik dimana selalu mendahulukan laporan dari masyarakat terkait kasus pungutan liar yang di ajukan oleh masyarakat bahkan rela meninggalkan aktifitas kantor demi menjaga keaamanan yang ada dalam ruang lingkup masyarakat.

Sama halnya dengan penjelasan yang diberikan oleh A rekan satu timnya yang menjelaskan bahwa:

“kami disini terikat pada aturan yang mewajibkan kami untuk selalu patuh terhadap aturan yang tertulis yang diberikan kepada kami, kami aparat yang melakukan penertiban terhadap pelanggaran yaitu pungli maka dari itu selayaknya kami harus benar-benar taat aturan sebelum mengaplikasikan tugas kami disini sebagai tim saber pungli”.

(Hasil wawancara dengan A, 3 September 2018 Jam 14:34 Wita).

Penjelasan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa Tim Saber Pungli memiliki aturan yang harus ditaati oleh para anggotanya sehingga tidak ada suatu penyimpangan yang terjadi, dengan adanya suatu sikap patuh

terhadap aturan yang telah ditetapkan dapat membuahkan sikap loyalitas terhadap pekerjaan yang dilakukan kepada para anggota dalam suatu instansi.

Sejalan dengan pendapat yang diberikan oleh AM anggota Polres Kabupaten Enrekang yang menjelaskan bahwa:

“tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang memiliki sikap yang baik atas apa yang harus mereka kerjakan karena anggaran yang diberikan dari pemerintah mewajibkan mereka untuk dapat meningkatkan kinerjanya semaksimal mungkin agar menghindari ketidakpuasan dari masyarakat terhadap layanan yang diberikan”

(Hasil wawancara dengan AM, 5 September 2018 Jam 11:30 Wita).

Kesimpulan dari jawaban anggota Polres Enrekang diatas menunjukkan bahwa para anggota tim Saber Pungli sudah memiliki sikap loyalitas karena selalu mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan pribadinya, artinya mereka sangat cinta akan pekerjaannya demi untuk menciptakan rasa puas dalam masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

Tidak berbeda dengan informasi yang dikemukakan oleh informan PJ Anggota Polres Enrekang yang mengatakan bahwa:

“mereka itu diwajibkan untuk taat pada aturan, karena mereka itu adalah tim penertib pungutan liar kan... jadi harus menerapkan kedisiplinan dalam lingkup mereka dulu baru kemasyarakat”

(Hasil wawancara dengan PJ, 5 September 2018 Jam 10 27 Wita).

Inti jawaban informan diatas adalah adanya aturan mewajibkan anggota dari tim Saber Pungli untuk selalu patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Dengan menanamkan sikap patuh terhadap aturan maka dapat membuahkan suatu sikap kecintaan atau loyalitas terhadap para aparatur Tim Saber Pungli di Kabupaten Enrekang.

Sama dengan apa yang dikemukakan oleh H masyarakat Kabupaten Enrekang yang mengatakan:

“...mereka telah melakukan tugasnya dengan baik, mereka berhasil menyelesaikan beberapa kasus kemarin,.. bukankah itu sudah membuktikan kalau mereka itu sudah memiliki loyalitas bukan...”.

(Hasil wawancara dengan H, 5 September 2018 Jam 16:30 Wita).

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat diatas terkait dengan loyalitas kerja dapat disimpulkan bahwa sikap loyalitas dari tim Saber Pungli sudah baik karena mereka telah mampu menyelesaikan beberapa kasus pungutan liar yang terjadi di Kabupaten Enrekang serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai aparat yang menangani kasus pungutan liar di Kabupaten Enrekang.

Informasi yang sama juga dikemukakan oleh B anggota masyarakat yang mengatakan bahwa:

“kemarin waktu ada pelanggaran pungli di pasar itu mereka langsung melakukan pengamanan kepada sekelompok pemuda itu yang melakukan pungli di pasar,.. saya rasa mereka sudah loyal”.

(Hasil wawancara dengan B, 5 September 2018 Jam 14:31 Wita).

Pendapat yang sama juga diberikan oleh informan S yang mengatani:

“mereka telah menjalankan tugasnya dengan baik seperti pada tahun kemarin mereka berhasil menyelesaikan kasus pungli sebanyak tiga kasus”.

(Hasil wawancara dengan S, 6 September 2018 Jam 08:01 Wita).

Kesimpulan jawaban dari kedua informan diatas adalah tindakan pengamanan atau terjun langsung kelapangan untuk melakukan pengamanan terhadap pungutan liar merupakan tugas pokok dari tim Saber Pungli, dengan menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya merupakan implikasi dari sikap kecintaan terhadap tugas yang dibebankan kepada aparat Tim Saber Pungli.

Berbeda dengan penjelasan yang dikemukakan oleh N masyarakat Kabupaten Enrekang yang berbunyi:

“menurut saya loyalitas dari para anggota tim saber pungli masih kurang, karena jika terdapat kasus pungutan liar hanya sebagian yang turun langsung ke lokasi..”.

(Hasil wawancara dengan N, 6 September 2018 Jam 13:32 Wita).

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga diberikan oleh SH yang berbunyi:

“mereka harus lebih memperhatikan tugas pokok mereka karena mereka adalah satu satunya tim yang bertugas untuk melakukan pengamanan terhadap pungli sedangkan masih ada tu pungli pungli di pasar”.

(Hasil wawancara dengan SH, 5 September 2018 Jam 13:01 Wita).

Pandangan kedua informan diatas menunjukkan bahwa masih adanya anggota tim yang tidak memiliki sikap loyalitas terhadap pekerjaannya, seperti halnya hanya sebagian dari para anggota tim yang terjun langsung kelapangan dalam melakukan operasi penangkapan kepada pelaku pungutan liar. Kurangnya kerja sama antara anggota tim mengakibatkan loyalitas kerja tim tersebut menjadi rendah.

Keseluruhan dari jawaban informan diatas terkait dengan loyalitas kerja para aparat Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa para anggota dari Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang telah menanamkan sikap kecintaan atas pekerjaannya serta taat pada aturan yang telah ditetapkan kepada mereka yang menunjukkan bahwa mereka telah loyal, kecintaan mereka atas pekerjaan terwujud dalam pelaksanaan tugasnya seperti halnya lebih mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan pribadinya.

2. Kualitas Pelayanan

Pelayanan pada dasarnya merupakan aktifitas seseorang, sekelompok dan atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Gronroos (Harbani:2010), menyatakan bahwa pelayanan merupakan suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan pegawai atau hal-

hal yang disediakan oleh organisasi pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan. Kasmir (Harbani:2010), mengatakan bahwa pelayanan yang berkualitas adalah kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada para pelanggan dengan standar yang telah ditentukan. Kualitas pelayan sangat berpengaruh dalam upaya pemenuhan kebutuhan serta keinginan dari masyarakat.

Ketepatan cara pelayanan yang baik akan mampu menunjang suatu keefektifan kinerja dari pihak yang memberikan pelayanan agar dapat memberikan kepuasan bagi pihak penerima layanan. Dalam hal ini kualitas pelayanan dari Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang dapat diukur dengan menggunakan indikator kesesuaian tugas serta kepuasan masyarakat.

a. Kesesuaian Tugas

Kesesuaian tugas merupakan salah satu faktor pembantu dalam penilaian kinerja. Oleh karena itu, pegawai yang tidak mengetahui dengan tujuan pekerjaan yang hendak dicapai, maka tujuan yang akan dicapai jauh dari kata efisien. Hal ini sejalan dengan pendapat Widodo (Harbani:2010), yang mengatakan bahwa seorang pemimpin harus menentukan apa yang menjadi tujuan dari organisasi pemerintah dan menentukan pula kriteria kinerjanya.

Kesesuaian tugas merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam melakukan pelaksanaan tugas searah dengan kebutuhan serta permintaan dari masyarakat yang didukung oleh kemampuan individu dalam pelaksanaan tugas.

Hasil wawancara dengan AT, Ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang terkait dengan kesesuaian tugas para aggotanya adalah:

“iya, seperti halnya bahwa Tim Saber Pungli bertugas untuk memberantas pungutan liar begitu pula yang kami lakukan bersama-sama dengan Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang dengan melakukan tugas pemberantasan sekaligus pencegahan pungutan liar”.
(Hasil wawancara dengan AT, 3 September 2018 Jam 13:23 Wita).

Kesimpulan hasil wawancara dengan ketua Tim Saber Pungli diatas menunjukkan bahwa tugas serta fungsinya sebagai penegak hukum dibidang pungutan liar sudah sejalan dengan kegiatan pemberantasan pungutan liar serta melakukan pencegahan pungutan liar yang selama ini dilakukan oleh para anggotanya.

Senada dengan pandangan dari A anggota dari Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:

“jika dikatakan sesuai maka kami berani mengatakan sesuai karena kami disini sudah melakukan tugas layaknya apa yang diperintahkan oleh atasan kami bahkan kami sering melakukan sosialisasi di masyarakat terutama di sekolah-sekolah menjelang penerimaan siswa baru untuk memberi peringatan kepada mereka untuk tidak melakukan pungutan liar kepada calon siswa baru nantinya”.
(Hasil wawancara dengan A, 3 September 2018 Jam 14:33 Wita).

Senada dengan informasi yang dibeikan rekan satu timnya yaitu P yang berbunyi:

“tugas kami disini sebagai pemberantas pungli dan itu sudah kami laksanakan dengan optimal, dengan memberantas pungli maka kami menjamin Kabupaten Enrekang akan lebih berkembang lagi”.
(Hasil wawancara dengan P, 4 September 2018 Jam 09:01 Wita).

Hasil wawancara dengan kedua anggota dari Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang diatas menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan dari tim tersebut sudah sesuai dengan tugas serta fungsinya dengan melakukan pencegahan pungutan liar serta melakukan sosialisasi dibagian yang kemungkinan akan terjadi tindakan pemungutan biaya secara tidak sah.

Wawancara yang dilakukan kepada PJ anggota Polres Kabupaten Enrekang tidak jauh berbeda yang mengatakan bahwa:

“keberadaan dari Tim Saber Pungli menjalankan tugasnya dengan sangat baik karena mereka ditugaskan untuk dapat melakukan suatu pemberantasan pungutan liar di semua bidang baik itu di masyarakat maupun pemerintahan contohnya kemarin melakukan pemeriksaan di bagian pembuatan SIM di kantor kami”.

(Hasil wawancara dengan PJ, 5 September 2018 Jam 10:07 Wita).

Senada dengan informan AM yang mengatakan bahwa:

“tim Saber yang dikomandoi oleh pak waka sangat kompeten dalam menjalankan tugasnya dan tentunya itu sudah sesuai dengan tugasnya”.

(Hasil wawancara dengan AM, 5 September 2018 Jam 10:27 Wita)

Kesimpulan hasil wawancara dari kedua informan diatas adalah tugas serta kegiatan yang dilakukan oleh Tim Saber sudah sesuai dengan kenyataan yang didapatkan dilapangan. Mereka telah melakukan pencegahan pungutan liar dengan cara melakukan pemeriksaan serta pengawasan kepada pihak kepolisian utamanya dibagian pelayan pembuatan SIM agar para aparatnya terbebas dari kegiatan pungutan liar.

Tidak berbeda dengan apa yang dikatakan oleh S masyarakat Kabupaten Enrekang yang menyatakan bahwa:

“sejak adanya tim saber kasus-kasus parkir liar serta kasus yang pernah didapatkan oleh tim tersebut sekarang sudah tidak pernah lagi didengar bahwa pada tempat tersebut masih ada pungli”.

(Hasil wawancara dengan S, 6 September 2018 Jam 08:00 Wita).

Hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa kasus yang pernah ditangani oleh Tim Saber Pungli sudah mampu memberikan efek jera kepada para pelaku maupun instansi itu sendiri untuk tidak lagi melakukan pemungutan secara liar, sehingga dengan adanya Tim Saber Pungli yang melakukan penanganan

terhadap pungutan liar telah memberikan suatu keuntungan yaitu tingkat pungutan liar pada Kabupaten Enrekang sudah berkurang.

Informasi yang diberikan oleh informan H yang menjelaskan bahwa:

“kasus yang mereka selesaikan tahun lalu itu ada tiga kasus dan semuanya adalah pungli maka dapat dikatakan bahwa mereka sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya”.

(Hasil wawancara dengan H, 5 September 2018 Jam 16:29 Wita).

Senada dengan informan B yang mengatakan:

“iya.. sudah sesuai itu karena memberantas pungli adalah tugasnya bukan..”.

(Hasil wawancara dengan B, 5 September 2018 Jam 14:31 Wita).

Sama halnya dengan penjelasan yang diberikan oleh N masyarakat Kabupaten Enrekang yang berbunyi:

“iya,... tentu saja tugasnya sudah sesuai dengan fungsi kehadiran dari tim saber itu sendiri,.. dilihat dari kasus yang telah mereka selesaikan, dan mendapat hasil mengurangi kasus pungli di Enrekang beberapa waktu yang lalu. ”.

(Hasil wawancara dengan N, 6 September 2018 Jam 13:04 Wita).

Kesimpulan dari ketiga jawaban informan diatas adalah sudah sesuai antara tugas utama dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim Saber Pungli yaitu melakukan pemberantasan terhadap pungutan liar, ditinjau dari beberapa kasus yang telah mereka tangani beberapa tahun terakhir serta membawa pengaruh yang baik yaitu berkurangnya angka pungutan liar di Kabupaten Enrekang.

Namun berbeda dengan pendapat yang diberikan oleh SH yang mengatakan bahwa:

“seharusnya mereka menerapkan kegiatan keliling-keliling di pasar atau dimana ke.. agar pungli itu benar benar tidak ada lagi”

(Hasil wawancara dengan SH, 5 September Jam 13:01 Wita).

Pendapat diatas merekomendasikan saran kepada tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang untuk melakukan atau menerapkan sistem patroli keliling pada lokasi

rawan terjadi pungutan liar agar kegiatan pungutan liar benar-benar dapat terhapuskan.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari semua jawaban informan yang telah tertulis diatas adalah tugas serta fungsi dari Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan tugas serta fungsinya sebagai aparaturnya pencegahan serta pemberantasan kasus pungutan liar baik pada ruang lingkup pemerintahan maupun dalam lingkup masyarakat. Pelaksanaan tugas serta sosialisasi yang dilakukan sangat berpengaruh terhadap berkurangnya kasus pungutan liar di Kabupaten Enrekang.

b. Kepuasan Masyarakat

Pemberian suatu pelayanan yang baik dari aparaturnya pemerintahan terhadap masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat Negara sebagai suatu aparaturnya pelayanan bagi masyarakat sehingga kedudukan aparaturnya pemerintahan sebagai *public services* sangat strategis karena akan menentukan sejauh mana Negara telah menjalankan fungsinya dengan baik kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan AT sebagai ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang menjelaskan bahwa:

“masyarakat menanggapi baik dengan adanya tim ini karena dengan adanya tim ini masyarakat merasa terbantu serta masyarakat yang ingin melakukan pungutan liar merasa takut untuk melakukan hal tersebut karena melihat telah adanya tim khusus yang menangani bahkan telah dimuat dalam media cetak bahwa PAD Kabupaten Enrekang meningkat dengan adanya Tim Saber Pungli”.

(Hasil wawancara dengan AT, 3 September 2018 Jam 13:30 Wita).

Kesimpulan hasil wawancara diatas adalah dengan adanya Tim Saber Pungli sangat membantu mereka karena tindakan serta hukuman yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli sudah mampu mencegah serta memberantas pungutan liar di

Kabupaten Enrekang bahkan media cetak telah meliput bahwa PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Enrekang meningkat dengan adanya tim tersebut.

Searah dengan pandangan yang diberikan oleh P anggota Tim Saber Pungli yang mengemukakan bahwa:

“aggapan yang saya dengar dari masyarakat dengan adanya tim ini mereka sangat terbantu terutama para pengunjung yang ada di pasar setral Kabupaten Enrekang mereka sangat terbantu karena sudah tidak ada lagi yang mengganggu aktivitas pebelanjaan yang mereka lakukan karena sudah tidak ada sekelompok pemuda yang melakukan parkir liar yang sangat meresahkan mereka”.

(Hasil wawancara dengan P, 4 September 2018 Jam 09:05 Wita)

Informan A rekan satu timnya juga memberikan pendapat bahwa:

“masyarakat tentunya sangat puas dengan adanya tim Saber Pungli karena mereka dapat terbantu dalam segala aktivitas mereka seperti dalam pelayanan bebas pungli”.

(Hasil wawancara dengan A, 3 September 2018 Jam 14:35 Wita).

Kedua hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa masyarakat utamanya para pembeli yang ada di Pasar Sentral Kabupaten Enrekang sangat terbantu dengan adanya Tim Saber Pungli yang telah melakukan penangkapan terhadap beberapa pemuda yang melakukan parkir liar yang mengganggu aktivitas perbelanjaan mereka.

Hasil wawancara dengan AM anggota Polres Kabupaten Enrekang memberikan penjelasan bahwa:

“saya tidak biasa mengatakan bahwa masyarakat puas dengan adanya tim ini namun saya menganggap bahwa msasyarakat sudah merasa terbantu dengan adanya tim ini untuk mngurangi pungutan liar”.

(Hasil wawancara dengan AM, 5 September 2018 Jam 11:35 Wita).

Kesimpulan hasil wawancara dengan informan dari pihak kepolisian diatas adalah masyarakat sudah terbantu dengan adanya Tim Saber Pungli yang

melakukan pemberantasan pungutan liar namun tidak dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah merasa puas dengan adanya tim ini dikarenakan berbagai faktor.

Senada dengan pendapat yang diberikan oleh PJ, yang mengatakan bahwa:

“sejak adanya tim Saber Pungli,.. pungutan liar di Kabupaten Enrekang sudah tidak ada lagi saya liat, khususnya di daerah pasar sentral, sudah tidak ada yang melakukan parkir liar karena mereka sudah takut untuk melakukannya, dan saya rasa masyarakatpun puas akan hal itu”.

(Hasil wawancara dengan PJ, 5 September 2018 Jam 10:25 Wita).

Bertolak belakang dengan pendapat yang dikemukakan oleh SH anggota masyarakat Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:

“tim Saber Pungli itu hanya membuang-buang anggaran karena kasus yang diselesaikannya tidak sesuai dengan anggaran yang sangat besar yang diberikan kepada mereka, masa hanya biasa menyelesaikan tiga kasus dalam satu tahun dan menghabiskan banyak dana hanya untuk menyelesaikan tiga kasus menurut saya tim ini hanya pemborosan dana saja”.

(Hasil wawancara dengan SH, 5 September 2018 Jam 10:30 Wita)

Kesimpulan hasil wawancara diatas adalah tidak puasnya masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli karena tidak ada kesesuaian antara dana yang diberikan oleh pemerintah terhadap kasus yang diselesaikan oleh tim tersebut , maka untuk memperbaiki pandangan tersebut maka Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang harus lebih serius lagi dalam melaksanakan tugasnya karena anggaran yang diberikan atau dijanjikan oleh pemerintah terhadap tim tersebut sangat besar.

Selaras dengan pendapat B masyarakat Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:

“saya kurang tau juga mengapa tim Saber Pungli dibentuk, bukankah sudah menjadi tugas dari kepolisian untuk melakukan pemberantasan pungutan liar juga... kenapa harus dibentuk tim Saber Pungli lagi,.. bukanka itu hanya melakukan pemborosan dana melihat kinerja tim itu juga tidak berpengaruh besar jika dilihat dari segi penyelesaian kasusnya”.

(Hasil wawancara dengan B, 5 September 2018 Jam 14:36 Wita).

Hasil wawancara dengan masyarakat diatas adalah tidak perlunya dilakukan lagi suatu pembentukan Tim Saber Pungli karena pungli juga bisa diatasi oleh kepolisian, ketidak puasan dari informan diatas didasari oleh ketidak sesuaiaan antara kasus yang diselesaikan dengan anggaran yang diberikan kepada Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang, sedangkan dalam pengukuran produktivitas yang baik dalam suatu instansi baik swasta maupun pemerintahan harus sesuai antara anggaran yang dikeluarkan serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Hal yang sama dikemukakan oleh S masyarakat Kabupaten Enrekang yang berbunyi:

“belum... mengapa saya katakana demikian kalau dipikir-pikir tim itu mendapatkan dana yang besar dari pemerintah tapi kenapa hanya dapat mengatasi pungli sebanyak tiga kasus berarti mereka belum mamampu mengembang amanah dengan baik kan..”.

(Hasil wawancara dengan S, 6 September 2018 Jam 07:59 Wita).

Tidak jauh berbeda dengan informasi yang diberikan oleh informan N yang mengatakan bahwa:

“kalau menurut saya harus lebih ditingkatkan lagi kinerjanya karena mengingat dana yang diberikan oleh pemerintah yang sangat besar kepada Saber Pungli itu,.. jadi harus ditingkatkan lagi kinerjanya agar masyarakat puas atas layanannya”.

(Hasil wawancara dengan N, 6 September 2018 Jam 13:04 Wita).

Bertolak belakang dengan informan H yang memberikan informasi sebagai berikut:

“saya pribadi merasa terbantu sekali dengan adanya tim Saber Pungli karena pungli itu merugikan sekali”.

(Hasil wawancara dengan H, 5 September 2018 Jam 16:30 Wita).

Wawancara dengan informan diatas menunjukkan bahwa persoalan dana yang tidak dipergunakan secara efektif menjadi faktor yang mendasari ketidak puasan dari informan diatas terhadap kinerja Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang.

Aggaran yang relatif besar yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang tidak sesuai dengan hanya menyelesaikan tiga kasus dalam satu tahun terakhir.

Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dari semua jawaban informan yang telah tertera diatas mengenai kepuasan masyarakat terhadap adanya Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang yaitu pemanfaatan dana yang kurang baik dari Tim Saber Pungli merupakan salah satu faktor yang mendasari ketidak puasan masyarakat terhadap layanannya. Maka harus dilakukan peningkatan kinerja yang lebih baik lagi dari Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang dalam menemukan kasus-kasus pungutan liar agar dapat tercipta pandangan yang baik dari masyarakat.

3. Responsibilitas

Responsibilitas yaitu kemampuan birokrasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, prioritas layanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah yang responsive merupakan pemerintah yang bijaksana dalam merespon masalah yang terjadi didalam masyarakat untuk kemudian mendapatkan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Responsibilitas merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh individu dalam melaksanakan tugas yang di amanahkan kepada mereka karena dengan adanya sikap tanggung jawab yang dimiliki oleh individu terhadap tugasnya dapat menunjang kemajuan suatu instansi yang digelutinya. Adapun hal penting yang harus diperhatikan dalam pengukuran responsibilitas dari para personil Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang dinilai dari tingkat kepekaan serta kecepatan pelaksanaan tugas.

a. Sensitivitas/kepekaan

Sensitivitas/kepekaan digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah dapat mengetahui kebutuhan masyarakat. Aparatur pemerintah harus memiliki sikap peka agar dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga pemerintah sebagai pemberi layanan dapat dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Dalam menerapkan responsibilitas dalam proses penyelenggaraan kepentingan publik maka akan di hasilkan pelayanan yang efektif serta optimal yang diberikan akan berorientasi terhadap kebutuhan masyarakat.

Individu dalam sebuah organisasi yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi akan mudah memahami atau menyadari adanya reaksi-reaksi tertentu dari orang lain baik yang bersifat positif ataupun negatif. Dengan adanya kepekaan akan mampu membuat seseorang untuk dapat bersikap secara tepat terhadap orang lain yang ada disekitarnya.

Hasil wawancara dengan AT ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang menjelaskan bahwa:

“iya, kami disini selalu merespon dengan baik apa-apa saja yang dikeluhkan oleh masyarakat baik dari yang kami temui langsung dilapangan maupun dari laporan yang kami terima dari masyarakat maupun intel yang kami tugaskan”.
(Hasil wawancara dengan AT, 3 September 2018 Jam 13:32 Wita)

Kesimpulan hasil wawancara dengan ketua Tim Saber Pungli diatas adalah Tim Saber Pungli memiliki respon yang baik terhadap semua hal yang berkaitan dengan keluhan maupun pengaduan yang diajukan oleh masyarakat maupun intel yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan terkait dengan pungutan liar.

Berbeda dengan pendapat yang diberikan oleh P anggota Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang yang berbunyi:

“beberapa kasus yang kami tangani akhir-akhir ini merupakan temuan langsung dilapangan,tidak adanya pengaduan dari masyarakat membuat kami susah untuk dapat memberantas pungli secara optimal”.
(Hasil wawancara dengan P, 4 September 2018 Jam 09:30 Wita).

Maksud dari informan diatas adalah kasus yang diselesaikan oleh Tim Saber Pungli merupakan temuan langsung dilapang atau OTT dan tidak adanya inisiatif dari masyarakat sekitar untuk melakukan pelaporan tentang pungutan liar.

Hasil wawancar dengan AM anggota Polres Enrekang mengatakan bahwa :

“perlu adanya suatu sosialisai yang rutin dari tim saber agar masyarakat dapat mengerti tata cara agar dapat melakukan pengaduan”.
(Hasil wawancara dengan AM, 5 September 2018 Jam 11:41 Wita).

Penjelasan yang diberikan oleh PJ juga memuat saran yang baerbunyi:

“harus melakukan peningkatan kinerja lagi supaya pungli di Enrekang bisah terselesaikan secara bersih”.
(Hasil wawancara dengan PJ, 5 September 2018 Jam 10:28 Wita).

Wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa kurang adanya rutinitas seperti sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat membuat masyarakat kurang memahami tata cara pengaduan kepada Tim Saber Pungli jika didapati sebuah pungatan liar.

Hasil wawancara dengan S masyarakat Kabupaten Enrekang menjelaskan bahwa:

“menurut saya, jika ditanya masalah kepekaan tim Saber Pungli itu belum peka karena mereka hanya sesekali turun kelokasi rawan pungli seperti pasar sekolah-sekolah dan tempat keramaian sedangkan yang saya lihat masih ada yang melakukan parkir liar”.
(Hasil wawancara dengan S, 6 September 2018 Jam 08:15 Wita).

Pendapat dari informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kurangnya patroli keliling yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli memberikan celah kepada pihak tertentu untuk melakukan pungutan liar pada tempat-tempat yang rawan pungli serta keramaian.

Hasil wawancara dengan H tidak jauh berbeda dengan pernyataan diberikan informan sebelumnya yaitu:

“menurut saya program pencegahan yang dilakukan oleh tim Saber Pungli belum terlaksana dengan baik, karena sepengetahuan saya tugas utama dari tim itu semata mata untuk dapat membersihkan pungli kan,.. baik itu di kota atau daera daerah di kabupaten ini, tapi yang saya liat itu didaerah pasar masih ada yang melakukan parkir liar sedangkan itu termasuk kedalam kategori pungli”.
(Hasil wawancara dengan H, 5 September 2018 Jam 16:37 Wita).

Penjelasan yang diberikan oleh informan diatas terkait dengan kepekaan menunjukkan rasa ketidak puasan kepada masyarakat, dikarenakan masih adanya pungutan liar yang terjadi di daerah sekitar pasar sedangkan itu merupakan tugas utama dari Tim Saber Pungli sebagai pihak menangani langsung kasus pungutan liar di kabupaten Enrekang.

Berbeda dengan pandangan dari informan N masyarakat Kabupaten Enrekang yang berbunyi:

“reponnya sudah baik karena sudah ada pemberitahuan serta arahan-arahan dari polisi untuk masyarakat agar tidak segan-segan melaporkan jika ada pungli yang terlihat”.
(Hasil wawancara dengan N, 6 September 2018 Jam 13:08 Wita).

Pandangan yang sama juga diberikan oleh informan B yang mengatqakan bahwa:

“tuntutan kami agar Enrekang bebas dari pungutan liar sudah terbebaskan dengan adanya tim khusus yang dibentuk untuk memberantas pungli itu dan saya rasa responnya juga cukup baik”.
(Hasil wawancara dengan B, 5 September 2018 Jam 14:34 Wita).

Inti dari kedua jawaban yang diberikan oleh informan N dan B terkait dengan kepekaan yaitu pihak kepolisian telah melakukan suatu sosialisasi kepada masyarakat tentang pungutan liar serta memberikan suatu arahan serta pengetahuan kepada masyarakat dalam melakukan suatu pelaporan atau pengaduan jika menemui suatu kegiatan pemungutan yang *illegal* baik dalam bentuk pembelian, pemalakan, ataupun penyogokan dari pihak yang yang tidak bertanggung jawab.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari semua pernyataan informan diatas terkait dengan indikator kepekaan yaitu tindakan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli pada saat menemukn pungutan liar yang ada dalam masyarakat sudah berjalan dengan baik namun kurangnya patroli keliling pada lokasi rawan pungutan liar serta pada lokasi keramaian memberikan cela kepada seseorang untuk melakukan pungutan liar, maka harus dilakukan rutinitas patroli keliling agar dapat mencegah keinginan seseorang untuk melakukan pungutan liar, serta masih kurangnya sosialisasi dari tim yang menyebabkan kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam melakukan pengaduan menjadi salah-satu faktor penghambat dalam meningkatkan kinerja tim.

b. Kecepatan Pelaksanaan Tugas

Kecepatan dalam pelaksanaan tugas merupakan unsur yang perlu diperhatikan dalam penerimaan suatu tugas. Dalam kaitannya dengan kecepatan maka perlu untuk melakukan suatu perencanaan yang matang untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut secara tepat waktu.

Hasil wawancara dengan AT Ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang menjelaskan bahwa:

“kami selalu berusaha untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat karena kami disini berdasarkan informasi dari intel yang kami tugaskan untuk melakukan penyamaran layaknya preman pasar untuk dapat melakukan operasi penyidikan pada lokasi rawan pungli”.

(Hasil wawancara dengan AT, 3 September 2018 Jam 13:57 Wita).

Berpatokan dengan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kecepatan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli agak sedikit terhambat dikarenakan mereka hanya bergantung pada informasi dari intel yang mereka tugaskan untuk mengasi aktifitas dalam masyarakat.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh A anggota Tim Saber Pungli yang mengatakan bahwa:

“jika ada laporan dari masyarakat kami langsung melakukan konfirmasi kepada ketua untuk turun langsung kelokasi terjadinya pungutan liar”.

(Hasil wawancara dengan A, 3 September 2018 Jam 14:40 Wita).

Sama halnya dengan jawaban yang diberikan oleh P yang menjelaskan bahwa:

“OTT yang kami lakukan kemarin kepada pegawai yang melakukan pungli dibagian KIR pada dinas perhubungan kami lakukan dengan cara terjun langsung kelapangan secara tepat dan cepat tanpa perantara”.

(Hasil wawancara dengan P, 4 September 2018 Jam 09:03 Wita).

Pendapat dari kedua anggota Tim Saber Pungli diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dari tim bergantung dengan perintah ketua tim. Dimana pada saat menerima laporan pengaduan tindakan pungutan liar mereka langsung berkoordinasi dengan ketua agar segera melakukan tindakan operasi penangkapan.

Hasil wawancara dengan PJ anggota Polres Kabupaten Enrekang yang memberi penjelasan yang berbunyi:

“hasil temuan yang mereka dapatkan dilapangan hanya tiga buah dalam satu tahun hanya dapat menyelesaikan tiga kasus, sedangkan masih ada tu yang melakukan pungli, nahh... itu biasa dikatakan bahwa pergerakan mereka dalam melakukan pencegahan pungli masih perlu ditingkatkan”.

(Hasil wawancara dengan PJ, 5 September 2018 Jam 10:32 Wita).

Sama halnya dengan informasi yang diberikan oleh AM yang mengatakan bahwa:

“tentunya dalam melaksanakan tugas harus cepat dan tepat, maka dari itu responnya harus ditingkatkan lagi”
(Hasil wawancara dengan AM, 5 September 2018 Jam 11:31 Wita).

Pendapat kedua informan diatas mengenai indikator kecepatan pelaksanaan tugas adalah perlu adanya peningkatan pelaksanaan tugas agar dapat meningkatkan penyelesaian kasus pungutan liar. Atas pertimbangan bahwa dana anggaran yang diberikan harus sesuai dengan kinerja yang dilakukan dalam pembertantasan pungutan liar.

Berlanjut dengan informasi yang diberikan oleh B masyarakat Kabupaten Enrekang yang memberikan penjelasan seperti berikut:

“sepengetahuan saya mereka sudah bekerja dengan baik, namun perlu peningkatan kinerja lagi untuk dapat menemukan kasus pungli lebih banyak lagi”.
(Hasil wawancara dengan B, 5 September Jam 14:41 Wita).

Kesimpulan hasil wawancara dengan masyarakat diatas menunjukkan bahwa kinerja dari Tim Saber Pungli tergolong rendah dan untuk meningkatkannya perlu adanya peningkatan kualitas kerja agar dapat menyelesaikan kasus pungutan liar secara menyeluruh di Kabupaten Enrekang.

Hasil wawancara dengan SH selaku masyarakat setempat yang mangatakan bahwa:

“kegiatan yang dilakukan oleh tim itu sepengetahuan saya sudah tergolong lancer melihat apa yang telah mereka dapatkan dibagian KIR yang salah satu anggotanya melakukan pungli dan mereka langsung menangkapnya dan katanya pelaku itu dipecat”.
(Hasil wawancara dengan SH, 5 September 2018 Jam 13:10 Wita).

Kesimpulan dari jawaban informan diatas ialah penanganan tindak pidana pungutan liar oleh Tim Saber Pungli sangat tegas kepada para pelaku pungli dan penelusuran masalah pungli yang dilakukan sudah meluas sampai kepada instansi pemerintahan.

Berlanjut dengan informasi yang diberikan oleh N masyarakat Kcamatan Enrekang yang menjelaskan:

“respon mereka cepat,.. buktinya kasus-kasus yang telah selesai sudah ada, bahkan telah mendapat tindakan bahkan ada yang dipecat dari jabatannya,..”.
(Hasil wawancara dengan N, 6 September 2018 Jam 13:10 Wita).

Penjelasan informan diatas terkait dengan indikator kecepatan pelaksanaan tugas dari tim Saber Pungli sudah terlaksana dengan baik, dengan melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang terjadi dengan cara terjun langsung ke lokasi kejadian serta memberikan hukuman sesuai dengan perundangan yang berlaku kepada pelaku demi untuk memberikan efek jera menunjukkan bahwa kecepatan serta ketepatan pelaksanaan tugas dari tim Saber Pungli telah tercapai dengan baik.

Penjelasan yang sama juga dikemukakan oleh informan S yang mengatakan bahwa:

“sosialisasi yang mereka lakukan kemarin ke sekolah-sekolah merupakan bukti kepekaan mereka terhadap pungutan liar”.
(Hasil wawancara dengan S, 6 September 2018 Jam 08:07 Wita).

Senada dengan informan H yang mengatakan:

“pergerakan yang mereka lakukan tergolong cepat seperti pada saat mereka melakukan penangkapan kepada para pemuda dipasar setral yang melakukan parkir liar”.
(Hasil wawancara dengan H, 5 September 2018 Jam 16:30 Wita).

Semua jawaban yang diberikan oleh informan diatas terkait dengan indikator kecepatan pelaksanaan tugas dari Tim Saber Pungli dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan atau tugas yang dilakukan oleh tim tersebut sangat baik jika ada kegiatan pungutan liar yang mereka dapatkan maka akan segera melakukan pergerakan pengamanan kepada pelaku pungutan liar tersebut serta hukuman yang diberikan kepada pelaku pungutan liar sangat tegas seperti halnya yang dilakukan kepada petugas yang bekerja dibagian KIR yang melakukan pungutan liar langsung dilakukan pemecatan kepada petugas tersebut.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktifitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma serta nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasikan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.

Akuntabilitas dalam suatu kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses yang antara lain meliputi (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan), dan kedisiplinan. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus sesuai dengan standar atau akta/janji pelayanan publik yang telah ditetapkan. Standar pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Apabila terjadi penyimpangan dalam hal pencapaian standar, harus melakukan upaya perbaikan.

Kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang

menjadi tanggung jawab kepada pihak yang memberikan amanah. Dalam hal ini akuntabilitas diukur dari segi tercapainya tujuan dari Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang.

Hasil Wawancara dengan AT Ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang menjelaskan bahwa:

“saya rasa bahwa tujuan kami sebagai aparat yang berperan langsung dalam pencegahan terhadap adanya pungutan liar sudah terlaksana dengan baik sudah terlihat dengan beberapa kasus yang telah kami temukan ditahun kemarin serta tahun ini dan telah memberikan tindakan yang tegas terhadap pelakunya”.
(Hasil wawancara dengan AT, 3 September 2018 Jam 13:30 Wita).

Kesimpulan dari jawaban ketua Tim Saber Pungli diatas adalah sudah tercapainya tugas dari tim dari Saber Pungli jika dilihat dari apaya yang telah dilakukannya dengan melakukan penindakan terhadap pungutan liar yang telah ditemukan di Kabupaten Enrekang dalam beberapa tahun terakhir.

Sama halnya dengan P anggota Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang yang berbunyi:

“menurut sepengetahuan saya Tim Saber Pungli sudah memenuhi tujuannya sebagaimana alasan dibentuknya, kita lihat saja dengan adanya tim ini sudah beberapa kasus yang terselesaikan dan juga hal ini sangat membantu demi tercapainya keadaan yang baik bagi masyarakat”.
(Hasil wawancara dengan P, 4 September 2018 Jam 09:15 Wita).

Senada dengan pendapat yang diberikan oleh rekan satu timnya yaitu A yang mengatakan bahwa:

“dengan adanya tim ini jumlah pungli di Enrekang menurun dan APD-nya meningkat,.. maka dari itu saya piker bahwa tujuan kami disini sudah tercapai meski ada beberapa hal yang harus dibenahi lagi”.
(Hasil wawancara dengan A, 3 September 2018 Jam 14:35 Wita).

Berdasarkan pendapat kedua informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa alasan dibentuknya tim Saber Pungli yaitu untuk memberantas pungutan liar dan itu

sudah dilakukan oleh Tim Saber Pungli dimana sejak terbentuknya Tim Saber Pungli sudah menyelesaikan beberapa kasus pungutan liar yang terjadi di Kabupaten Enrekang dan hal tersebut telah menciptakan keadaan yang baik dalam masyarakat.

Bunyi penjelasan dari PJ anggota Polres Enrekang memberikan penjelasan yang sama bahwa:

“setelah melihat kinerja dari tim Saber Pungli itu beberapa tahun terakhir maka dapat dikatakan bahwa tujuannya sudah tercapai karena mereka sudah melakukan penangkapan terhadap pihak yang melakukan pungutan liar serta melakukan tindak lanjut atas kasus yang mereka dapatkan”.
(Hasil wawancara dengan PJ, 5 September 2018 Jam 10:40 Wita)

Penjelasan dari informan diatas menunjukkan bahwa tujuan dari tim tersebut sudah tercapai dengan berlandaskan pada kasus-kasus yang telah diselesaikan serta tindakan yang dilakukan atas pelaku pungli sudah terlaksana.

Senada dengan informasi yang diberikan oleh informan AM yang memberikan informasi sebagai berikut:

“pungutan liar yang mereka dapatkan di pasar sentral yang melibatkan beberapa pemuda juga di bagian KIR dan di pasar Cakke yang melibatkan kepala pasarnya tahun lalu menunjukkan bahwa tujuan utamanya sebagai petugas pungli sudah tercapai”.
(Hasil wawancara dengan AM, 5 September 2018 Jam 11:40 Wita).

Tercapainya tujuan dari tim Saber Pungli menurut informan diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa kasus yang telah ditangani oleh Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang menjadi tolak ukur sehingga dikatakan bahwa tujuan terbentuknya Tim Saber Pungli telah tercapai karena telah melakukan tugasnya sesuai dengan tugas serta fungsinya sebagai aparat pengak kasus pungutan liar di Kabupaten Enrekang.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh H masyarakat Kabupaten Enrekang yang menjelaskan bahwa:

“pembentukan tim Saber Pungli ini sangat membantu karena kita sudah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang lebih demi mendapatkan pelayanan dan juga kita tidak perlu cemas lagi karena kita biasa melaporkan ke pihak yang berwajib jika ada kegiatan pungli yang terjadi,.. adami juga poskonya bisa langsung kesana kalau ada pungli”.

(Hasil wawancara dengan H, 5 September 2018 Jam 16:30 Wita)

Pencapaian tujuan dari Tim Saber Pungli menurut pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa Tim Saber Kabupaten Enrekang sudah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, juga memberikan rasa aman atas pungutan liar serta telah mendirikan suatu posko pengaduan tentang pungutan liar yang menjadi pusat pelayanan atau pelaporan yang memadai bagi masyarakat Kabupaten Enrekang.

Berbeda dengan pendapat yang diberikan oleh S masyarakat Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:

“menurut saya belum terlihat secara jelas pencapaian tujuannya karena saya tidak pernah melihat mereka melakukan pengawasan atau berkeliling pasar dan tempat-tempat lain yang sering terjadi pungli dan tidak menuntut kemungkinan bahwa tidak ada yang melakukan pungli secara diam-diam”.

(Hasil wawancara dengan S, 6 September 2018 Jam 08:10 Wita).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh B yang berbunyi:

“menurut sepengetahuan saya program pemberantasan punglinya sudah tercapai tapi dalam mengatasi atau mencegahnya itu belum teratasi,.. karena kalau mau mencegah atau menghapuskan pungli itu harus melaksanakan rutinitas patroli misalnya keliling pasar atau apake... ”.

(Hasil wawancara dengan B, 5 September 2018 Jam 14:35 Wita).

Kesimpulan hasil wawancara dengan kedua informan diatas adalah kuarangnya aktivitas patroli yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli untuk dapat mencegah kegiatan pungutan liar yang dilakukan secara diam-diam. Maka harus dilakukan

patroli keliling secara terjadwal dan terencana agar benar-benar dapat membuat pungutan liar di Kabupaten Enrekang dapat terhapuskan.

Berbeda dengan pemaparan dari anggota masyarakat yang lain N yang mengatakan bahwa:

“tujuan dari dibentuknya tim itu kalau menurut saya sudah tercapai ya,.. akan tetapi harus ditingkatkan lagi, kalau perlu setiap saat harus diawasi ditempat yang rawan pungli dilakukan”.

(Hasil wawancara dengan N, 6 September 2018 Jam 13:12 Wita).

Pemaparan informan diatas menunjukkan bahwa telah tercapainya tujuan pembentukan aparaturnya yang bertugas khusus dalam menangani kasus pungutan liar di Kabupaten Enrekang. Informan diatas juga memberikan suatu saran kepada Tim Saber Pungli agar melakukan suatu peningkatan kinerja dengan melakukan suatu patroli setiap saat pada suatu tempat yang rawan terjadi pungutan liar agar praktek pungutan liar benar-benar dapat terselesaikan.

Dengan melakukan beberapa pertimbangan terhadap semua jawaban informan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa akuntabilitas atau tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli sudah baik, terbukti dengan adanya suatu posko pengaduan yang dibangun oleh Tim Saber Pungli yang bertujuan untuk dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat agar dapat melakukan pengaduan terhadap tindakan pungutan liar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pemaparan dan juga pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya tentang masalah serta temuan-temuan langsung dilapangan mengenai penelitian “Kinerja Tim, Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polisi Resort (Polres) di Kabupaten Enrekang”. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Tim Sapu Bersih Pungutan liar (Saber Pungli) di Kabupaten Enrekang yang meliputi:

1. Produktivitas dengan indikator ketepatan waktu serta loyalitas kerja menunjukkan bahwa ketepatan waktu pelaksanaan tugas dari para aparatur dari Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang sudah baik serta sikap loyalitas dari Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa para anggota dari tim tersebut menanamkan sikap kecintaan atas pekerjaannya yang menunjukkan bahwa mereka telah loyal, seperti halnya lebih mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan pribadinya.
2. Kualitas pelayanan yang meliputi kesesuaian tugas dan kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa telah sesuai tugas serta fungsi dari pekerjaan yang dilakukan namun kepuasan masyarakat atas pelayanannya masih rendah.
3. Responsibilitas yang meliputi kepekan serta kecepatan pelaksanaan tugas yang masih perlu dibenahi karena kurangnya patroli.
4. Akuntabilitas atau tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli sangat tinggi, terbukti dengan adanya suatu posko pengaduan yang dibangun oleh Tim Saber Pungli dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat melakukan pengaduan terhadap tindakan pungutan liar.

B. Saran

Hasil kesimpulan diatas mengenai “Kinerja Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang” maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang untuk malakukan soisialisasi kepada masyarakat tentang pungutan liar, memaparkan kepada masyarakat tata cara pengaduan tentang pungutan liar, dan peningkatan kualitas pelayanan yang baik serta pemanfaatan anggaran atau dana yang diberikan harus benar benar efisien.
2. Saran kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam hal melakukan pengaduan kepada Tim Saber Pungli jika melihat adanya kegiatan pungutan liar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini, Yunita. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Fahmi, Irham. 2010. *Manajemen Kinerja Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta CV.
- Lamatenggo, Nina dan Hamza B. Uno. 2014. *Teori Kinerja Dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Moleong, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdayakarya.
- Nawawi Uha, Ismail. 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan Dan Kinerja (Proses Terbentuk, Tumbuh Kembang, Dinamika, Dan Kinerja Organisasi)*. Jakarta: kencana prenaadamedia Group.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pasolong Harbani. 2010. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Prawirosentono, Suyadi dan Dewi Primasari. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Kinerja Motivasi Karyawan Membangun Organisasi Kompetitif Era Perdagangan Bebas Dunia*. Yogyakarta: BPFE.
- Prayudi, Guese. 2012. *Panduan Lengkap Hukum Pidana Dan Perdata*. Yogyakarta: Book Yogyakarta.
- Rahmayanty Nina, 2010. *Manajemen Pelayanan Prima*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ratminto, Atik Sapti. 2012. *Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohman, Ainur, dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Malang: Program Sekolah Demokrasi PLaCIDS (*Public Policy Analysis and Community Development Studies*).
- Sedarmayanti. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT Refika Aditama.

Surjadi, 2012. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno Edy, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suwardi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ulum, Ihyaul, Ahmad Juanda. 2016. *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.

Widodo Eko, Suparno.2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suber Lain:

Darwis,Muhammad.2015.Pengaruh Tunjangan Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Bank Universitas Negeri Makassar.

Jurnal-jurnal sosial
Fall 122

Muhammad,Farouk.2013.Kinerja Polri Pasca Polri Mandiri

Jurnal-jurnal sosial
Fall 352

Ramadhani,Wahyu.2017.Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan

Jurnal-jurnal sosial
Fall 22

L

A

M

P

I

R

A

N

RIWAYAT HIDUP



Hendra, lahir pada tanggal 18 Juni 1996, di Dusun Bule Desa Tallung Tondok Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke- 2 dari 3 bersaudara, dari pasangan Tammu dan Sanira.

Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di TK Aisyah Bule pada tahun 2002 sampai 2003 kemudian penulis melanjutkan ke tingkat sekolah dasar di SDN 141 Bule Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama di SMPN 1 Malua Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang dan tamat pada tahun 2011. Setelah tamat SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Malua Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang dan tamat pada tahun 2014. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Adapun pengalaman organisasi yang penulis geluti didalam serta diluar kampus yaitu Kader Muhammadiyah, Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrenpulu Cabang Malua (HPMM Cabang Malua), dan Organisasi Mahasiswa Pemuda Intelektual (OMPI).

“PEDOMAN WAWANCARA”

A. Produktivitas

1. Bagaimanakah ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas dari Tim Saber Pungli?
2. Bagaimanakah sikap Loyalitas Terhadap tugas yang diberikan?

B. Kualitas Pelayanan

1. Apakah pekerjaan yang dilakukan oleh para anggota dari Tim Saber Pungli sudah sesuai dengan Tugas Dan Fungsi dari Tim Saber sendiri?
2. Bagaimana respon dari Masyarakat dengan adanya Tim Saber Pungli?

C. Responsibilitas

1. Apakah Tim Saber Pungli memiliki respon yang baik dalam Menerima laporan dari Masyarakat mengenai praktek Pungutan Liar?
2. Apakah Tim Saber Pungli memiliki respon yang cepat dalam Menerima laporan dari Masyarakat mengenai praktek Pungutan Liar?

D. Akuntabilitas

1. Apakah Tim Saber Pungli sudah mencepai tujuannya sebagai aparaturn yang menangani tentang kasus Pungli di Kabupaten Enrekang?

DOKUMENTASI





MATRIKS WAWANCARA

Pertanyaan	Informan			
	Ketua Tim Saber Pungli (1)	Anggota Tim Saber Pungli (2)	Anggota Polres Enrekang (2)	Masyarakat (5)
Produktifitas				
a) Bagaimanakah ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas dari Tim Saber Pungli?	Tim saber pungli selalu melaksanakan tugasnya secara tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang telah melaksanakan tugasnya dengan tepat. 2. Tim saber pungli mengutamakan agar selalu tepat waktu dalam hal melaksanakan tugas agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugasnya itu berpatokan kepada pengaduan masyarakat dan laporan dari intel. 2. Mampu untuk dapat memanfaatkan waktu yang diberikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian kasus yang diberikan oleh tim Saber Pungli memakan waktu yang relatif lama. 2. Layanan yang diberikan oleh tim Saber pungli sudah baik. 3. mereka tepat waktu sekali 4. mereka telah tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya 5. bukan sekedar tepat waktu tapi juga tepat sasaran
b) Bagaimanakah sikap Loyalitas Terhadap tugas yang diberikan?	Sangat loyal atas tugas yang diberikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kami sangat loyal terhadap tugas kami 2. Kami disini terikat pada aturan yang mewajibkan kami untuk selalu patuh terhadap aturan yang tertulis yang diberikan kepada kami 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sikap yang baik atas apa yang harus mereka kerjakan 2. Mereka telah melakukan tugasnya dengan baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loyalitas dari para anggota tim saber pungli masih kurang 2. Mereka telah melakukan tugasnya dengan baik 3. Langsung melakukan pengamanan 4. Mereka berhasil menyelesaikan kasus pungli sebanyak tiga kasus 5. Menurut saya loyalitas dari para anggota tim saber pungli masih kurang
Kualitas Layanan				
a) Apakah	Tim Saber Pungli Kabupaten Enrekang	1. Kami disini sudah	1. Tim Saber Pungli	1. Parkir liar serta kasus

MATRIKS WAWANCARA

<p>pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya?</p>	<p>dengan melakukan tugas pemberantasan sekaligus pencegahan pungutan liar</p>	<p>melakukan tugas layaknya apa yang diperintahkan oleh atasan kami</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dengan memberantas pungli maka kami menjamin Kabupaten Enrekang akan lebih berkembang lagi 	<p>menjalankan tugasnya dengan sangat baik</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sangat kompeten dalam menjalankan tugasnya dan tentunya itu sudah sesuai dengan tugasnya 	<p>yang pernah didapatkan oleh tim tersebut sekarang sudah tidak pernah lagi didengar</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tugasnya sudah sesuai dengan fungsi kehadiran dari tim saber itu sendiri 3. Dapat dikatakan bahwa mereka sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya 4. Sudah sesuai itu karena memberantas pungli 5. Sudah sesuai dengan fungsi kehadiran dari tim saber itu sendiri
<p>b) Bagaimana respon dari masyarakat tentang adanya Tim Saber Pungli?</p>	<p>Masyarakat menanggapi baik dengan adanya tim ini</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mereka sangat terbantu terutama para pengunjung yang ada di pasar setral Kabupaten Enrekang 2. Masyarakat tentunya sangat puas dengan adanya tim Saber Pungli 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat sudah merasa terbantu dengan adanya tim ini 2. Saya rasa masyarakatpun puas akan hal itu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Saber Pungli itu hanya membuang-buang anggaran 2. Kinerja tim itu juga tidak berpengaruh besar jika dilihat dari segi penyelesaian kasusnya 3. Mereka belum mampu mengembangkannya dengan baik 4. Saya pribadi merasa terbantu sekali dengan adanya tim Saber Pungli karena pungli itu merugikan sekali 5. Kinerjanya harus lebih ditingkatkan lagi.

MATRIKS WAWANCARA

Responsibilitas				
a) Bagaimana respon dari Tim Saber saat menerima laporan pungli?	Kami disini selalu merespon dengan baik apa-apa saja yang dikeluhkan oleh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya pengaduan dari masyarakat membuat kami susah untuk dapat memberantas pungli secara optimal 2. Tidak adanya pengaduan dari masyarakat membuat kami susah untuk dapat memberantas pungli secara optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya suatu sosialisai yang rutin 2. Harus melakukan peningkatan kinerja lagi supaya pungli di Enrekang bisah terselesaikan secara bersih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Saber Pungli itu belum peka 2. Program pencegahan yang dilakukan oleh tim Saber Pungli belum terlaksana dengan baik 3. Responnya sudah baik karena sudah ada pemberitahuan serta arahan-arahan dari polisi 4. Didaerah pasar masih ada yang melakukan parkir liar sedangkan itu termasuk kedalam kategori pungli 5. Tuntutan kami agar Enrekang bebas dari pungutan liar sudah terbebaskan dengan adanya tim khusus yang dibentuk untuk memberantas pungli
b) Apakah tim Saber Pungli memiliki respon yang cepat dalam melaksanakan tugas?	Kami selalu berusaha untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika ada laporan dari masyarakat kami langsung melakukan konfirmasi kepada ketua 2. OTT yang kami lakukan kemarin kepada pegawai yang melakukan pungli dibagian KIR pada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergerakan mereka dalam melakukan pencegahan pungli masih perlu ditingkatkan 2. Harus ditingkatkan lagi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mereka sudah bekerja dengan baik 2. Sudah tergolong lancar melihat apa yang telah mereka dapatkan 3. Respon mereka cepat 4. Penganan yang mereka lakukan sudah baik. 5. Mereka cepat dalam melakukan tindakan

MATRIKS WAWANCARA

		dinas perhubungan kami lakukan dengan cara terjun langsung kelapangan secara tepat dan cepat		
Akuntabilitas				
a) Apakah tim Saber Pungli sudah mencapai tujuannya sebagai aparat yang menangani kasus pungli?	Tujuan kami sebagai aparat yang berperan langsung dalam pencegahan terhadap adanya pungutan liar sudah terlaksana dengan baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Saber Pungli sudah memenuhi tujuannya sebagaimana alasan dibentuknya 2. Dengan adanya tim ini jumlah pungli di Enrekang menurun dan APD-nya meningkat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuannya sudah tercapai karena mereka sudah melakukan penangkapan 2. Tujuan utamanya sebagai petugas pungli sudah tercapai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim Saber Pungli ini sangat membantu 2. Belum terlihat secara jelas pencapaian tujuannya 3. Sudah tercapai 4. Tujuannya sudah sama dengan apa yang harus mereka kerjakan. 5. Program pemberantasan punglinya sudah tercapai tapi dalam mengatasi atau mencegahnya itu belum teratasi

Matriks Perbaikan

No	Nama Penguji	Saran	HAL	Hasil Perbaikan	HAL
1	Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si	Jelaskan Instansi yang terlibat dalam pemberantasan pungli	4-6	Sudah diperbaiki	4-6
2	Dr. Hj. Sudarmi, M.Si	Munculkan dengan jelas bahwa ini adalah program Polres Enrekang	4,5	Sudah diperbaiki	4,5
3	Dr. Muhammad Tadir, M.Si	1. Perbaiki teknik penulisan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi	1-72	Sudah diperbaiki	1-72
		2. Saran-saran hasil penelitian ini sebaiknya difokuskan: <ul style="list-style-type: none"> a. Segala kekurangan atau kelemahan dari simpulan penelitian disarankan untuk diperbaiki atau ditingkatkan. b. Segala yang telah baik disarankan untuk dikembangkan lagi. 	71,72	Sudah diperbaiki	71,72
4	Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si	Pertajam latar belakang masalah serta fokuskan kesimpulan hasil penelitian pada bab lima.	1-5, 73	Sudah diperbaiki	1-5, 73